

SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL KEPADA
LANSIA DI UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
SAMARINDA



OLEH :

NUR ALVINA ZAHROH
NPM : 2163201008

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA

2025

SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL KEPADA
LANSIA DI UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
SAMARINDA



OLEH:

NUR AVINA ZAHROH

NPM: 2163201008

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM

SAMARINDA

2025


HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi kebijakan perlindungan sosial kepada lansia di UPTD panti sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda
Nama : Nur Alvina Zahroh
NPM : 2163201008
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik
Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda

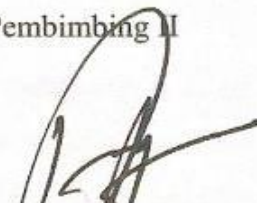
Samarinda, 14 Juni 2025

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. H. Abdul Rofik, S.P.,M.P
NIDN. 116117001

Pembimbing II


Ahmad Yani, S.Sos, M.Si
NIK. 2020.087.279

Mengetahui,


Dekan

Dr. H. Abdul Rofik, S.P.,M.P
NIK. 2023.070.326

Penguji

1. Dr. H Abdul Rofik, S.P.,M.P
2. Ahmad Yani, S.Sos,M.Si
3. Firdayanti Ayu Nurinda, S.IP., M.A.B

1. 
2. 
3. 

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Alvina Zahroh
NPM : 2163201008
Judul Skripsi : Implementasi kebijakan perlindungan sosial kepada lansia di UPTD panti sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian dalam bentuk Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari peneliti sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan programing yang tercantum sebagai bagian dari laporan skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, peneliti mencantumkan sumber secara jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 14 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Nur Alvina Zahroh
NPM. 2163201008

RINGKASAN

Nur Alvina Zahroh, Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Kepada Lansia di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda, dibawah bimbingan Bapak M.Habibi. S.Sos.,M.Kesos selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ahmad Yani, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing II.

Penuaan adalah proses alami yang menyebabkan penurunan fisik, kemandirian, dan produktivitas lansia, sehingga mereka rentan terhadap kemiskinan dan ketergantungan. Pemerintah berupaya memberikan perlindungan sosial melalui program dan lembaga seperti UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri di Samarinda. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala, seperti kurangnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, stigma terhadap panti sosial, dan birokrasi yang rumit, terutama bagi lansia tanpa identitas. Akibatnya, banyak lansia belum menerima pelayanan yang optimal. Diperlukan upaya perbaikan menyeluruh agar perlindungan sosial bagi lansia dapat berjalan lebih efektif dan merata.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Kepada Lansia Di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan perlindungan sosial kepada lansia serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan sosial kepada lansia. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, teknik analisis data menggunakan model analisis data teori dari Mubes dan Huberman, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model implementasi kebijakan Edward III digunakan sebagai kerangka analisis, dengan fokus pada variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda, bahwa implementasi kebijakan perlindungan sosial bagi lansia telah berjalan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. yang dikarenakan masih kekurangan dalam hal fasilitas. Tetapi adapun keberhasilan yang didukung oleh komunikasi yang efektif, baik personal maupun administratif, serta respons empatik petugas terhadap kebutuhan lansia. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, sikap adaptif terhadap efisiensi, dan birokrasi yang fleksibel turut memperkuat pelayanan. Faktor pendukung menunjukkan kebijakan perlindungan sosial bagi lansia berjalan baik dengan layanan sesuai standar dan manajemen berkomitmen. Namun, Faktor penghambat anggaran dan dokumen pribadi lansia menjadi hambatan utama.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Perlindungan, Lansia, UPTD

RIWAYAT HIDUP



Nur Alvina Zahroh, lahir pada tanggal 22 Desember 2002 di Samarinda Sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari Ayah Andi Firman dan Ibu Hamsiah. Pendidikan dimulai dari tahun 2008 di Taman Kanak-kanak Al-Usmani, kemudian tahun 2009 memasuki Sekolah Dasar Negeri 034 Samarinda dan lulus pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2015 memasuki SMP Negeri 37 Samarinda dan lulus pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2018 memasuki Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 17 Samarinda dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2021 melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik. Dan pada tahun 2024 mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Loa Pari, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian peneliti melakukan penelitian skripsi di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri yang berada di Jl. Mayjend Soetoyo, Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata-1 (S-1).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Kepada Lansia di UPTD panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik (S. AP) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Pada penelitian skripsi ini peneliti telah banyak mendapatkan bantuan moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini peneliti juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang berkaitan atas dorongan serta dukungan yang telah diberikan pada peneliti, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M. Pd., M. T. selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk manempu studi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda sekaligus dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, juga sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak M.Habibi, S. Sos., M.Kesos selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan,masukan,serta motivasi kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta staf akademik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada peneliti selama mengikuti masa perkuliahan.
6. Terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada kedua orang tua saya, malaikat tanpa sayap dalam hidup penulis, Bapak Andi Firman dan Ibu Hamsiah. Dari langkah pertama hingga titik ini, setiap pencapaian penulis adalah buah dari keringat, doa, dan pengorbanan yang tak pernah diminta kembali. Dalam diam kalian berdoa, dalam letih kalian tersenyum, seolah semua beban dunia bisa ditanggung asalkan anakmu tetap berjalan. Penulis tahu tak ada kalimat yang cukup untuk membalas segala yang telah kalian berikan, tapi dalam setiap halaman skripsi ini tertulis doa dan cinta untuk kalian. Jika hari ini anakmu bisa berdiri, itu karena kalian tak pernah membiarkan anakmu jatuh. Semoga Allah membalas segala cinta dan lelah kalian dengan surga yang paling indah
7. Terima kasih juga kepada saudara dan saudari tercinta, Andi Zidan Mubarak, Nur Salsabila Sulfiani.

8. Terima kasih juga untuk nenek,kakek dan semua keluarga yang sudah mendukung dan mendoakan.
9. Terima kasih kepada Eliska Anjani yang udah sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, memberi semangat di saat penulis ingin menyerah, dan mengingatkan untuk terus maju meski jalan terasa berat. Kehadiranmu menjadikan proses ini lebih ringan dan penuh warna.
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Anggriana, Nona, Wendy, Zenal, Irfan, Prilin, dan Brenda yang sudah membantu,mendukung dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Terima kasih juga kepada teman-teman SMK saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya. Bantuan dan semangat dari kalian sangat berarti dalam perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih juga kepada keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2023/2024 yang sudah banyak membantu.
13. Jordan Syaputra Wehantouw, terima kasih telah menjadi sosok yang tak hanya menemani, tapi juga menguatkan di setiap langkah. Untuk semua dukungan, semangat dan pengertian yang kamu berikan, kamu hadir bukan hanya sebagai penyemangat, tapi juga sebagai penyemangat, tapi juga sebagai rumah yang membuat penulis merasa tenang di tengah tekanan dan rasa lelah
14. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri atas segala perjuangan, kesabaran, dan keteguhan hati yang telah saya jalani selama menyelesaikan skripsi ini. Di saat lelah dan

ragu datang, saya mampu bangkit kembali dan terus melangkah tanpa menyerah. Terima kasih telah tetap kuat menghadapi segala tantangan, menjaga semangat, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah, tapi saya bangga karena saya berhasil melewatinya dengan tekad yang kuat. Semoga perjuangan ini menjadi bukti bahwa saya mampu meraih apa yang saya impikan.

Pada penyusunan skripsi ini peneliti menyadari banyaknya kekurangan dalam penelitian skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti, maka dengan terbuka peneliti menerima masukan, kritikan, dan saran perbaikan skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini bermanfaat. Akhir kata peneliti mohon maaf sebesar - besarnya atas kekurangan dan kesalahan yang dilakukan.

Samarinda, 14 Juni 2025

Peneliti

Nur Alvina Zahroh
2163201008

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORI	11
2.1 Variabel Penelitian	11
2.1.1 Implementasi	12
2.1.2 Kebijakan	13
2.1.3 Kebijakan Publik.....	15
2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik.....	16
2.1.4.1 Model-model implementasi.....	17
2.1.4.2 Pendekatan implementasi kebijakan	24
2.2 Pengertian Perlindungan Sosial.....	32
2.3 Pengertian lanjut usia	33
2.3.1. Ciri-ciri lanjut usia.....	35
2.3.2. Karakteristik Lanjut Usia	35
2.4 Kerangka pikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jadwal Penelitian.....	38
3.2 Jenis Penelitian.....	39

3.3	Lokasi Penelitian	40
3.4	Definisi Konsepsional	41
3.5	Fokus Penelitian	42
3.6	Sumber Data	43
	3.6.1. Data Primer.....	44
	3.6.2. Data Sekunder	45
3.7	Teknik Pengumpulan Data	46
3.8	Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		52
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
4.2	Profil UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda....	53
4.3	Visi dan Misi UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	55
4.4	Keadaan Sumber Daya Manusia	56
4.5	Tujuan Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	56
4.6	Fungsi Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri.....	57
4.7	Penyajian Data Hasil Penelitian	57
4.8	Pembahasan.....	73
	4.8.1 Implementasi Kebijakan.....	73
	4.8.2 Komunikasi	74
	4.8.3 Sumber Daya.....	75
	4.8.4 Diposisi/Sikap	77
	4.8.5 Birokrasi.....	79
4.9	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	81
	4.9.1 Faktor pendukung	81
	4.9.2 Faktor Penghambat	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		83
5.1	Kesimpulan	83
5.2	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA		86

DAFTAR GAMBAR

	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Berpikir	37
3.1	Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman	50

DAFTAR TABEL

	Judul	Halaman
1.1	Data Presentase Penduduk Lansia Menurut Kabupaten/Kota.....	3
3.1	Jadwal Penelitian.....	39
3.2	Data Key Informan dan Informan.....	45
4.1	Jumlah Aperatur Sipil Negara UPTD PSTW Samarinda.....	53
4.2	Sarana UPTD PSTW Samarinda.....	54
4.3	Prasarana UPTD PSTW Samarinda.....	54
4.4	Jumlah Lanjut Usia di UPTD PSTW Samarinda.....	55
4.5	Jenis dan Standar Pelayanan.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia menjadi tua bukan suatu hal yang luar biasa, karena proses peristiwa akan dialami oleh semua orang, yang sudah pasti datang pada orang-orang yang berumur panjang sehingga dalam penuaan perubahan yang terjadi tidak dapat dihindari. secara fisiologis usia lanjut akan mengalami banyak perubahan dalam semua aspek kehidupan, misalnya perubahan fisik yang ditandai dengan kulit mengerut, rambut memutih, mulut mulai ompong, pendengaran kurang jelas, penglihatan semakin memburuk, gerakan lambat dan bentuk tubuh yang tidak lagi proporsional.

Hal ini dapat mengakibatkan tingkat produktivitas dan kemandiriannya secara nyata semakin berkurang, maka dari itu kelompok lansia merupakan salah satu kelompok yang identik dengan sakit-sakitan, tergantung pada orang lain, serta tidak mampu lagi melakukan apa-apa. dengan ini maka secara umum lansia dipandang sebagai beban bagi masyarakat.

Disebutkan juga bahwa lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun. lansia dikategorikan menjadi dua yang ditentukan berdasarkan kemampuan mereka untuk berkontribusi secara ekonomi dan sosial yaitu:

1. Lansia produktif adalah penduduk berusia 60 tahun ke atas yang masih aktif bekerja atau mengikuti kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Mereka dapat berkontribusi baik secara ekonomi maupun dalam aktivitas sosial masyarakat.

2. Lansia non-produktif adalah penduduk berusia 60 tahun ke atas yang sudah tidak mampu lagi bekerja atau memberikan kontribusi signifikan terhadap kegiatan perekonomian. mereka mungkin bergantung pada bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Katagori ini biasanya mencakup orang-orang yang berusia 75 tahun ke atas.

Maka dari itu perlindungan sosial menjadi tujuan negara dan juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjaga dan memastikan seluruh rakyat Indonesia dalam kondisi sejahtera tanpa terkecuali dengan harapan agar kehidupan masyarakat Indonesia lebih sejahtera. Dengan cara memberikan program bantuan terutama kepada masyarakat yang telantar khususnya bagi lanjut usia terlantar.

Perlindungan sosial lanjut usia merupakan upaya pemerintah dan masyarakat untuk memberikan dukungan dan pelayanan kepada individu berusia lanjut usia, terutama yang tidak memiliki potensi ekonomi. Meliputi program bantuan sosial, akses layanan kesehatan, dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, jumlah lanjut usia di Kalimantan Timur pada tahun 2024 yakni sekitar 71,29% jiwa.

Tabel 1.1 : Data Persentase Penduduk Lansia Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Lansia Menurut Kabupaten/Kota	
	2024	2025
Paser	5,69	6,05
Kutai Barat	7,85	8,31
Kutai Kartenegara	7,26	7,69
Kutai Timur	4,79	5,09
Berau	5,15	5,47
Penajam Paser Utara	7,96	8,44
Mahakam Ulu	11,12	11,71
Balikpapan	6,07	6,43
Samarinda	5,68	6,03
Bontang	3,65	3,87
Kalimantan Timur	6,07	6,43
JUMLAH	71,29	75,52

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan, tindak kekerasan, pelanggaran hukum, hal ini menyebabkan lansia tidak dapat hidup mandiri dan membutuhkan dukungan orang lain. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 pasal 14 tentang kesejahteraan sosial, salah satu tujuan dibentuknya perlindungan sosial adalah untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang

pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial, perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Kota Samarinda yang memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada para Lanjut Usia Terlantar, yaitu UPTD panti sosial Tresna Werdha Nirwana Puri yang terletak di jalan Mayjend Sutoyo di Kalimantan Timur Kota Samarinda memiliki 37 bangunan yang dapat menampung dan melayani kaum lanjut usia sebanyak 100 orang sesuai daya tampung yang ada.

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri melaksanakan tugas-tugas pokok yang meliputi pelayanan, yaitu kebutuhan sehari-hari, kebutuhan makanan setiap harinya yang bergizi bagi lanjut usia, bimbingan fisik, mental, sosial, rekreasi, keterampilan lanjut usia dan juga bimbingan rohani. Selain itu, Tugas UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri juga berperan sebagai keluarga bagi para lanjut usia, pusat informasi dan pelayanan komunikasi kesejahteraan lanjut usia yang terlantar.

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada lanjut usia, namun masih dirasakan masih kurang, Meskipun ada program bantuan sosial, hanya sebagian kecil lansia yang menerima manfaat. Dengan hadirnya UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi lansia dan memberikan perlindungan sosial. Bagi lanjut usia melalui program pelayanan dan pengembangan yang terencana,

berkesinambungan dan tepat guna, sehingga lanjut usia dapat terpelihara dengan baik, memperbaiki kondisi faktor fisik dan faktor usia pada lanjut usia.

Hasil pengamatan yang peneliti lakukan implementasi kebijakan perlindungan sosial kepada lansia sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti komunikasi, ketersediaan sumber daya, posisi atau sikap aparat pemerintah, dan struktur birokrasi yang ada di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda, yaitu :

1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pihak pemerintah, organisasi sosial, dan masyarakat dapat menghambat penyampaian informasi yang tepat sasaran kepada lansia, yang berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan perlindungan sosial itu sendiri.
2. Terdapat keterbatasan sumber daya, baik dalam jumlah tenaga kerja yang terlatih maupun dana yang dialokasikan untuk program perlindungan sosial lansia. Keterbatasan ini dapat memengaruhi kualitas pelayanan dan distribusi bantuan sosial kepada lansia.
3. Posisi/Sikap, Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri masih sering dianggap hanya sebagai tempat penampungan, bukan sebagai lembaga yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan lansia, sehingga perhatian terhadap pengembangan program masih minim. Selain itu, beberapa lansia cenderung pasif atau enggan perubahan sikap berbagai pihak agar lansia mendapatkan perlindungan sosial yang layak dan martabat.

4. Struktur birokrasi yang kompleks menjadi kendala bagi lansia tanpa identitas dalam mengakses perlindungan sosial. Proses pengurusan dokumen kependudukan sering kali panjang dan sulit dipenuhi, terutama bagi lansia terlantar atau penghuni panti

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Kepada Lansia di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sebelum peneliti merumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan definisi dari perumusan masalah. Menurut Sugiono (2019:660) “Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”.

Surakhmad Wunarno (2017:15) mengatakan “Masalah adalah sesuatu hal yang menyebabkan tidak tercapainya suatu tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya atau sebagai jarak antara apa yang di harapkan dan apa yang menjadi kenyataan”.

Menurut Frankel and Wallen (dalam Sugiyono, 2015:84), “Masalah penelitian merupakan sesuatu yang pasti, dimana masalah merupakan segala sesuatu yang akan diteliti, merupakan kondisi yang akan ditingkatkan, merupakan kesulitan yang ingin dieliminasi, dan merupakan pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya”.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah merupakan langkah awal yang penting dalam penelitian, di mana masalah diidentifikasi sebagai pertanyaan yang memerlukan jawaban melalui pengumpulan data. Masalah itu sendiri dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang menghalangi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, menciptakan jarak antara harapan dan kenyataan. Dalam konteks penelitian, masalah tidak hanya mencakup hal-hal yang ingin diteliti, tetapi juga mencakup kondisi yang perlu ditingkatkan, kesulitan yang ingin diatasi, dan pertanyaan yang perlu dijawab. Dengan demikian, perumusan masalah menjadi fondasi penting dalam proses penelitian untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mencari tahu berjalannya Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Kepada Lansia di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda.
2. Mencari data tentang faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Kepada Lansia di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda.

1.3 Tujuan Penelitian

Sebelum peneliti merumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan definisi dari perumusan masalah. Menurut Sugiyono (2019:66) “Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan penelitian yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”.

Menurut Sukardi (2018:18) mengemukakan bahwa “Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh suatu yang baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah untuk yang setiap saat dapat timbul di masyarakat”.

Sedangkan menurut Andi Prastowo (2016:42) mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan realitas secara kontekstual. dalam konteks ini, interpretasi berperan besar pada pemahaman peneliti terhadap fenomena yang menjadi perhatiannya, dan pada pemahaman partisipasi terhadap masalah yang diselidiki”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan perlindungan sosial kepada lansia di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri.
2. Mengidentifikasi Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan sosial kepada lansia di UPTD Panti Sosial Tresna Tresna Werdha Nirwana Puri.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti maupun kepada orang lain. Menurut Sugiyono (2015:397) “Manfaat penelitian bisa bersifat teoritis dan praktis. Peneliti kualitatif lebih bersifat teoritis, yaitu pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya”.

Selanjutnya menurut Rachmad Trijono (2015:15) “Manfaat penelitian pada dasarnya adalah kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian terdiri dari

fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi”. Kemudian menurut Kaelen (2015:235) “Suatu penelitian harus mempunyai kegunaan jelas bagi kehidupan manusia, baik secara praktis, pragmatis, maupun manfaat secara teoritis. Berdasarkan menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang juga merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Dalam tahap ini juga dirumuskan manfaat dari hasil penelitian dilakukan oleh peneliti. Berikut penjelasan manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai referensi bagi dunia pemerintahan, pendidikan, dan juga umum.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan agar dapat menambah suatu informasi dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti berikutnya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Kepada Lansia Di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini pengelola panti dapat lebih memahami kebutuhan lansia di UPTD Panti Sosial Tresna Nirwana Puri Samarinda, hal ini memungkinkan pengelola panti untuk merancang program yang lebih relevan dan tepat sasaran, sehingga lansia merasa nyaman di dalam

panti.

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan sosial bagi lansia, sehingga dapat mendorong dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Variabel Penelitian

Secara umum, penelitian ilmiah menggunakan teori yang merupakan unsur dan sangat penting sebagai landasan atau landasan pemikiran ilmiah. Oleh karena itu, penelitian harus menyatakan maksud dan tujuan dari adanya teori dan konsep dalam penelitian.

Menurut Sugiyono (2020:54) “Dalam rangka melakukan suatu penelitian yang bersifat ilmiah, tentulah harus didukung oleh beberapa teori dan konsep yang dianggap sesuai untuk dijadikan sebagai pedoman dan landasan bagi peneliti”. Variabel penelitian sangat penting untuk didukung oleh teori dan konsep, ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan yang membantu peneliti dalam mengarahkan dan memperkuat penelitian yang dilakukan.

Menurut Pasolong (2017: 77) “Adalah abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu. Teori pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini”. Menurut Idrus (2019:17) “Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak, contohnya seperti kejadian, keadaan, dan kelompok”.

Dari penjelasan para ahli yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori dan konsep memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan pemikiran dalam penelitian ilmiah. Teori dan konsep yang relevan diperlukan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi peneliti, sehingga

penelitian dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan fokus. Konsep, sebagai abstraksi dari fenomena yang dihasilkan melalui generalisasi, serta istilah dan definisi yang menggambarkan gejala secara abstrak, membantu peneliti dalam memahami dan menjelaskan objek penelitian. Dengan demikian, keberadaan teori dan konsep tidak hanya memperkuat validitas penelitian, tetapi juga memfasilitasi pencapaian tujuan penelitian yang diinginkan.

2.1.1 Implementasi

Implementasi merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, tidak lebih dan tidak kurang. Dalam menjalankan suatu kebijakan publik, terdapat dua pendekatan yang dapat diambil, yakni dengan melaksanakannya secara langsung dalam bentuk program atau melalui penyusunan kebijakan lanjutan sebagai turunan dari kebijakan utama tersebut.

Lester, dan Sterward dalam Mukhtar, dkk (2022:13) “Implementasi adalah suatu proses meletakkan program pemerintah ke dalam pengaruh, yaitu proses keseluruhan dari penerjemahan mandat yang sah, apakah itu perintah dari eksekutif atau undang-undang yang telah ditetapkan kedalam suatu program yang telah sesuai dengan arahan struktur yang menyediakan pelayanan atau menciptakan barang”.

Menurut Winarno (2017:70) menjelaskan “Implementasi merupakan perluas kegiatan yang saling menyelaraskan”. Nurdin Usman (2017:70) menjelaskan “Implementasi merupakan usaha atau aktivitas yang dilaksanakan dalam penerapan semua agenda dan kebijaksanaan yang sudah ditetapkan dan

diformulasikan dengan dilengkapi segala keperluan yang diperlukan, siapa yang melaksanakannya, di mana tempat pelaksanaannya, alat-alat yang diperlukan dan bagaimana cara yang harus dilakukan, suatu proses rangkaian aktivitas tidak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang operasional maupun strategis atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula”.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah disampaikan, implementasi dapat disimpulkan proses krusial dalam mengubah kebijakan atau program pemerintah menjadi tindakan nyata. Proses ini melibatkan penerjemahan mandat yang sah menjadi program yang sesuai dengan struktur pelayanan atau produksi barang, seperti yang dijelaskan oleh Lester dan Steward. Selain itu, implementasi juga mencakup kegiatan yang saling menyelaraskan, serta serangkaian aktivitas yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk pengambilan keputusan, penentuan lokasi, alat yang diperlukan, dan metode pelaksanaan. Dengan demikian, implementasi adalah proses yang kompleks dan terstruktur yang bertujuan untuk mewujudkan kebijakan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

2.1.2 Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerja, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Menurut Hasan (2020:147) mengatakan “Kebijakan dapat didefinisikan sebagai rangkaian asas dan konsep sehingga menjadi garis besar dan dasar rencana dalam penerapan suatu kegiatan tujuan, *leadership*, pekerjaan, cara bertindak (terkait pemerintahan, lembaga, organisasi dan sebagainya), prinsip, pernyataan cita-cita dan panduan untuk manajemen dalam upaya mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan”.

Menurut Frederick dalam Leo Agustiono (2019:7) mendefinisikan “Kebijakan adalah serangkaian aktivitas yang diajukan oleh individu maupun kelompok atau pemerintah dalam suatu kawasan tertentu di mana di dalamnya terdapat hambatan-hambatan serta kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Bagian penting ini dari definisi sebuah kebijakan adalah kebijakan dapat melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan tertentu karena idealnya sebuah kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari apa yang sudah di rencanakan dalam suatu kegiatan”.

Menurut Solichin Abdul Wahab (2017:40) mengatakan bahwa “Pengertian dari kebijakan sendiri masih banyak terjadi perbedaan pendapat antara para ahli dan masih menjadi ajang perdebatan”. Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dijabarkan, pengertian kebijakan adalah bahwa kebijakan merupakan rangkaian asas, konsep, dan aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks pemerintahan, lembaga, atau organisasi. kebijakan sebagai garis besar rencana yang mencakup elemen-elemen penting seperti tujuan dan kepemimpinan. Federick menambahkan bahwa kebijakan melibatkan aktivitas

yang diusulkan oleh individu atau kelompok, dengan mempertimbangkan hambatan dan kesempatan dalam pelaksanaannya. Selain itu, Solichin Abdul Wahab menunjukkan adanya perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai definisi kebijakan, mencerminkan kompleksitas dan dinamika dalam pemahaman konsep ini. Secara keseluruhan, kebijakan berfungsi sebagai kerangka kerja terstruktur untuk mengarahkan tindakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat perdebatan mengenai definisinya.

2.1.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan, keputusan, dan program yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dan mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan sosial, dan biasanya dirumuskan melalui proses analisis, perencanaan, dan evaluasi.

Menurut Carl Frederick dalam Joko Promono (2020:30) mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Menurut Easton dalam Winarno (2017:16) mengatakan “Kebijakan publik adalah *the authoritative allocation of values for the whole society* atau dapat diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa seluruh masyarakat.”

Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Winarno (2017:17) mengartikan “Kebijakan publik sebagai asumsi yang di dalamnya memuat keadaan awal serta akibat yang ditimbulkan serta dapat diprediksi. Kebijakan publik harus dapat dibedakan dengan karakter dari kebijakan lain, hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh faktor-faktor bukan pemerintah, contohnya kebijakan swasta”.

Dari beberapa pengertian kebijakan publik di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik terdiri dari serangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah untuk mengatasi masalah dalam konteks tertentu, dengan mempertimbangkan hambatan dan peluang yang ada. Kebijakan publik berperan penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan, melibatkan pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada masyarakat, dan mencakup asumsi tentang keadaan awal serta akibat yang dapat diprediksi. Selain itu, kebijakan publik dibedakan dari kebijakan swasta yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar pemerintah. Secara keseluruhan, kebijakan publik berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mempengaruhi kehidupan masyarakat demi mencapai tujuan bersama.

2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Menurut Horn dan Meter dalam Nawawi (2017:131) mengartikan “Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang dilaksanakan baik oleh perseorangan, pemangku atau organisasi pemerintah maupun swasta yang difokuskan guna tercapainya suatu *goals* atau cita-cita yang telah ditentukan dalam ketentuan sebuah kebijakan”.

Menurut Horn dan Meter dalam Nawawi (2017:131) menjelaskan sifat dari kebijakan yang akan dilaksanakan sangat mempengaruhi proses implementasi. Konsep yang penting dalam setiap prosedur implementasi adalah kontrol, perubahan dan bertindak.

Menurut Sabatier dan Mazmanian dalam Nawani (2017:145) menerangkan bahwa “*Policy implementation*” merupakan aktualitas keputusan kebijakan dasar yang pada umumnya berbentuk undang-undang, tetapi bisa juga berbentuk keputusan-keputusan eksekutif atau perintah-perintah atau keputusan badan peradilan.” Dari beberapa penjelasan para pakar diatas disimpulkan bahwa implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan, definisi, pemantauan dan penentuan waktu. Implementasi kebijakan memerlukan kepatuhan pihak yang melaksanakannya terhadap ketentuan pihak yang melaksanakannya terhadap ketentuan yang dibuat oleh pemerintah (pemuat kebijakan).

2.1.4.1 Model-Model Implementasi

Tindakan implementasi kebijakan meliputi upaya untuk mengubah suatu keputusan menjadi kegiatan operasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan mengupayakan upaya bertahap yang ditentukan oleh ketentuan kebijakan yang dilaksanakan oleh/lembaga publik untuk mencapai cita-cita yang diinginkan.

Menurut Van Meter dan Van Horn 1985 dalam Tresiana (2019:56) mengatakan “Model yang paling klasik, yakni model yang mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik,

implementor, dan kinerja kebijakan publik”. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang memengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut :

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- b. Karakteristik agen pelaksana/implementor
- c. Kondisi ekonomi, sosial, dan publik
- d. Kecendrungan (*disposition*) pelaksana/implementor

Menurut Goggin, Bowman, dan Lester dalam Tresiana (2019:59) menerangkan “Model ini mengembangkan apa yang disebut sebagai “*communication model*” untuk implementasi kebijakan, yang disebutnya sebagai generasi ketiga model implementasi kebijakan. Goggin, dkk. Bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variable yaitu *independent, intervening, dan dependent* dan meletakkan faktor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

Model implementasi diantaranya dikembangkan oleh George Edward III tahun 1980 disebut dengan *Direct and Indirect Impact of Implementation*. Menurut kerangka pemikiran George Edwards III (1980 : 10-11) dalam Tachjan (2016:56) “Model implementasi kebijakan publik menunjukkan empat variabel yang berperan penting dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi”.

Pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

(1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Menurut George Edward III, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

a. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (minkomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah

jelas dan tidak membingungkan. Ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, para tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya menurut George Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan. Sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu:

a. Staf

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi

Informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. Wewenang

Umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan. Di satu pihak, efektifitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tetapi disisi lain efektifitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut George Edward III adalah Disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan publik ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang harus dicermati pada variabel disposisi, Menurut George Edward III adalah:

a. Pengangkatan birokrat

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

b. Insentif

Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, hal tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi pada kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan membuat sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik menurut Edward III yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik adalah melakukan *standard operating prosedures* (SOPS) dan melaksanakan fragmentasi. SOPS adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja.

2.1.4.2 Pendekatan implementasi kebijakan

Pendekatan implementasi kebijakan merujuk pada cara atau metode yang digunakan untuk menerapkan kebijakan publik dalam praktik. Menurut Erwan Agus (2015: 36) menjelaskan Pendekatan implementasi adalah pendekatan perubahan-perubahan, tentang bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Secara umum, berdasarkan cara peneliti Generasi II memahami dan menjelaskan permasalahan implementasi, mereka dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu para pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up*.

1. Pendekatan *Top-Down*

Menurut Hogwood & Gunn dalam Erwan Agus (2015:37) menjelaskan Pendekatan yang bersifat *Top-Down* dipakai untuk mengklasifikasikan para peneliti Generasi II yang menggunakan logika berfikir dari 'atas' kemudian melakukan pemetaan 'ke bawah' untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Menggunakan

bahasa Sabatier (1986), pendekatan *Top-Down* dilakukan oleh para peneliti dengan langkah sebagai berikut: "*They started with policy decision (usually statute) and examined the extent to which its legally-mandated objectives were achieved over time and why*". Pendekatan ini sering kali juga disebut '*policy-centered*' karena fokus perhatian peneliti hanya tertuju pada kebijakan dan berusaha untuk memperoleh fakta-fakta apakah kebijakan tersebut ketika diimplementasikan mampu mencapai tujuannya atau tidak.

Dalam interpretasi Barrett 2004, studi implementasi yang menggunakan pendekatan *top-down* tujuan utamanya adalah: "untuk mengidentifikasi penyebab masalah atau kegagalan implementasi dan menyarankan cara untuk meningkatkan kemungkinan mencapai kepatuhan terhadap tujuan kebijakan, umumnya berfokus pada strategi untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, pengelolaan sumber daya dan pengendalian agen pelaksana". Dari pendapat Barrett tersebut terlihat jelas bahwa studi implementasi Generasi II memiliki kecenderungan untuk menjelaskan persoalan-persoalan (hambatan atau kegagalan) yang berkaitan dengan implementasi suatu kebijakan dan atas dasar faktor-faktor yang membuat implementasi gagal tersebut peneliti akan memberikan resep atau solusi atas persoalan tersebut. Oleh karena itu beberapa ahli sering menyebut apa yang dilakukan oleh para peneliti Generasi II yang menggunakan pendekatan *Top-Down* tersebut sebagai pendekatan yang pesimistis. Sebutan yang demikian karena kecenderungan mereka untuk melakukan studi terhadap kegagalan implementasi.

Menurut Barret dalam Erwan Agus (2015: 38) Secara garis besar, tahapan-tahapan kerja para peneliti Generasi II yang menggunakan pendekatan *Top-Down* biasanya adalah sebagai berikut:

- a. Memilih kebijakan yang akan dikaji.
- b. Mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan yang secara formal tercantum dalam dokumen kebijakan,
- c. Mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan
- d. Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran dengan baik (sesuai dengan *Standard Operating Procedure* yang ada);
- e. Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan tersebut memiliki manfaat baik kelompok sasaran
- f. Mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran menistakan keluaran kebijakan yang mereka terima, kemudian diarahkan untuk mengetahui apakah dampak yang muncul tersebut berimplikasi terhadap terwujudnya tujuan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kebijakan.

Dengan langkah-langkah kerja sebagaimana digambarkan, maka penelitian yang bersifat *top-down* lebih tepat dipakai untuk menilai efektivitas implementasi suatu kebijakan, yaitu untuk memastikan apakah tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat tercapai di lapangan atau tidak.

2. Pendekatan *Bottom-Up*

Menurut Sabatier dalam Erwan Agus (2015:42) menjelaskan hasil kerja para peneliti Generasi yang menggunakan pendekatan *Top-Down* telah memberikan banyak kontribusi terhadap upaya untuk memahami realitas implementasi kebijakan, akan tetapi beberapa peneliti Generasi II tidak terlalu puas dengan pendekatan *Top-Down* yang dianggap terlalu menyederhanakan masalah dan cenderung instrumentalis karena hanya menaruh perhatian terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Padahal, menurut para pengkritik pendekatan *Top-Down* ini, realitas implementasi kebijakan bisa jadi lebih kompleks dan tidak hanya berkepentingan dengan isu efektivitas atau efisiensi implementasi suatu kebijakan saja.

Ada empat kritik yang dilontarkan terhadap pendekatan top-down oleh para peneliti implementasi yang kritis, seperti: Hjern dan Hull (1982), Hanf (1982), Barrett dan Fudge (1981), dan Elmore (1979). Empat kelemahan pendekatan *top-down* tersebut adalah:

- a. Menganggap bahwa aktor utama yang paling berpengaruh dalam implementasi adalah para *policy maker*, sehingga mereka lupa bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dipengaruhi oleh aktor-aktor lain yaitu birokrat garda depan, kelompok sasaran, sektor swasta dan lain-lain.
- b. Pendekatan *Top-Down* sulit diterapkan ketika tidak ada kebijakan atau faktor yang dominan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa suatu persoalan publik menarik perhatian banyak pihak sehingga upaya untuk

mengatasi persoalan tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah akan tetapi juga swasta dan masyarakat sipil.

- c. Pendekatan *Top-Down* melupakan kenyataan bahwa birokrat garda depan dan kelompok sasaran memiliki kecenderungan untuk menyelewengkan arah kebijakan bagi kepentingan mereka masing-masing.
- d. Siklus kebijakan itu sendiri sering tahapan-tahapannya tidak bersifat *clear-cut*, sehingga membuka ruang bagi birokrat garda depan dan kelompok sasaran untuk mempengaruhi dan melakukan negosiasi pada saat formulasi kebijakan dilakukan hingga berlanjut pada implementasi.

Beberapa peneliti Generasi II kemudian mengembangkan pendekatan yang kemudian mereka disebut sebagai *Bottom-Up*. Pendekatan *Bottom-Up* ini dipelopori oleh Elmore (1978,1979), Lipsky (1971), Berman (1978) dan Hjern, Hanf, serta Porter (1978). Para pengikut pendekatan *bottom-up* menekankan pentingnya memperhatikan dua aspek penting dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu: birokrat pada level bawah (*street level bureaucrat*) dan kelompok sasaran kebijakan (*target group*). Argumen yang menjadi dasar tentang pentingnya memperhatikan peran *street level bureaucrat* sangat terkait dengan posisinya dalam melakukan kegiatan merealisasikan keluaran kebijakan (apabila keluaran kebijakan berupa pelayanan) atau menyampaikan keluaran kebijakan tersebut kepada kelompok sasaran (apabila keluaran kebijakan berupa hibah, bantuan, subsidi, dan lain-lain). Dengan perannya yang demikian, oleh karena itu, *street level*

bureaucracy menduduki posisi kunci yang akan sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Di samping *street level bureaucrat*, menurut para *bottom-uppers* (sebutan untuk para pendukung pendekatan *bottom-up*), implementasi juga akan berhasil apabila kelompok sasaran dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan kebijakan maupun implementasinya. Hal inilah yang sering dilupakan oleh para penganut aliran *Top-Down*.

Setelah menunjukkan berbagai kelemahan pendekatan yang bersifat *Top-Down* maka para *bottom-up* menganjurkan pendekatan penelitian dengan pendekatan *bottom-up* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memetakan *stakeholder* (aktor dan organisasi) yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada level terbawah.
- b. Mencari informasi dari para aktor tersebut tentang pemahaman mereka terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan apa kepentingan mereka terlibat dalam implementasi.
- c. Memetakan keterkaitan (jaringan) para aktor pada level terbawah tersebut dengan aktor-aktor pada level di atasnya.
- d. Peneliti bergerak kearah dengan memetakan aktor pada level yang lebih tinggi dengan mencari informasi yang sama,
- e. Pemetaan dilakukan terus sampai pada level tertinggi (*policy makers*).

Dengan pola penelitian sebagaimana digambarkan tersebut, tujuan penelitian implementasi dengan pendekatan *bottom-up* ini adalah untuk mengetahui jaringan implementasi yang melibatkan para aktor dari berbagai

level tersebut dan memetakan motif ekonomi-politik para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Tentang hal ini Schofield (2004:288) mengatakan: "*Bottom-Up approaches tend to focus more closely on policy network, often in multi-agency settings*". Pemetaan jaringan implementasi dan motif ekonomi-politik ini akan menjadi faktor penting untuk menjelaskan sebab-musabab kegagalan dan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Adapun menurut Van Meter & Van Horn 1985 dalam Tresiana (2019:44) menjelaskan bahwa analisis implementasi hakikatnya merupakan penilaian atas kinerja kebijakan, kinerja kebijakan amat ditentukan oleh faktor-faktor berupa:

1. Standar (ukuran dasar) dan tujuan kebijakan. ini berkaitan dengan sejauh mana standar direalisasikan, sebab : sering terlalu luas dan kabur sehingga susah diukur.
2. Sumber-sumber kebijakan : dana SDM, fasilitas.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, khususnya mengkomunikasikan standar aturan, sehingga diperoleh ketepatan dan konsistensi sekaligus sebagai alat ukur dalam pengawasan.
4. Karakteristik badan pelaksana, menyangkut karakteristik, norma dan pola hubungan yang ada. Dalam hal ini yang harus di cermati adalah kompetensi dan jumlah staf, rentang kendali (hirarki), dukungan politik yang dimiliki, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan dan kebebasan, komunikasi, keterkaitan dengan kebijakan.
5. Kondisi sosial ekonomi dan politik.

6. Sikap pelaksana, meliputi persepsi pelaksana atas masalah, standar dan tujuan sejauh mana bertentangan dengan pendekatan dalam implementasi kebijakan.

Pendekatan menurut Hogwood dan Gunn 1984 dalam Tresiana (2019:45) memandang “Ada 10 hal yang menjamin kesuksesan implementasi kebijakan, yakni :

1. Situasi di luar faktor pelaksana tidak menimbulkan pembatasan yang melumpuhkan
2. Waktu yang cukup dan sumber daya yang memadai harus tersedia untuk program
3. Tidak ada batasan sumber daya secara keseluruhan, melainkan kombinasi sumber-sumber yang tersedia.
4. Kebijakan yang didasari oleh teori sebab akibat yang valid.
5. Hubungan sebab akibat bersifat langsung.
6. Ada satu pelaksanaan yang tidak tergantung pada pelaksana yang lain, walaupun ada harus seminimal mungkin ketergantungannya.
7. Pemahaman terhadap tujuan dalam setiap proses implementasi.
8. Spesifikasi tugas pelaksanaan secara rinci.
9. Komunikasi yang sempurna.
10. Pimpinan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Dari penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan Pendekatan *Top-Down* lebih cocok untuk menilai efektivitas kebijakan, sedangkan *bottom-up* lebih relevan untuk memahami jaringan dan dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan. Keduanya saling melengkapi dalam memahami implementasi kebijakan. pendekatan implementasi kebijakan tidak hanya terletak pada banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan, tetapi juga pada cara faktor - faktor saling berinteraksi, setiap elemen, baik internal maupun eksternal berperan dalam membentuk hasil akhir dari kebijakan yang diterapkan.

2.2 Pengertian Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah serangkaian kebijakan, program, dan tindakan yang dirancang untuk melindungi individu dan kelompok dari risiko sosial dan ekonomi yang dapat mengancam kesejahteraan mereka.

Menurut Barrientos dan Shephed dalam Bambang Rustanto (2014:23) mengatakan “Perlindungan sosial secara tradisional dikenal sebagai konsep yang lebih luas dari jaminan sosial, lebih luas dari asuransi sosial, dan lebih luas dari jejaring pengaman sosial”.

Kemudian menurut Suharto (2015:22) “Perlindungan sosial merujuk kepada proses, kebijakan dan intervensi yang sebagai besar dikembangkan oleh pemerintah guna merespon resiko ekonomi, politik, dan keamanan yang dihadapi oleh pendukung- terutama penduduk miskin dan rentan, Sebagai serangkaian kebijakan, perlindungan sosial merujuk kepada apa yang data dicapai pemerintah dalam rangka menyediakan perlindungan bagi warga negaranya terutama

penduduk miskin dan rentan, kebijakan publik tersebut berperan sebagai artikulus kewajiban Negara dalam memenuhi hak dasar setiap warga negaranya”.

Adapun menurut Hans Gsager dalam Bambang Rustanto (2014:23) berpendapat “Bahwa sistem-sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk mendukung penanggulangan situasi darurat ataupun kemungkinan terjadinya keadaan darurat”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Perlindungan sosial merupakan serangkaian kebijakan, program, dan intervensi yang dirancang untuk melindungi individu maupun kelompok dari risiko sosial dan ekonomi yang dapat mengganggu kesejahteraan mereka, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. Konsep ini mencakup cakupan yang lebih luas dibandingkan jaminan sosial, asuransi sosial, dan jejaring pengaman sosial. Perlindungan sosial tidak hanya mencerminkan upaya pemerintah dalam merespons berbagai risiko seperti ekonomi, politik, dan keamanan, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negaranya. Selain itu, sistem perlindungan sosial juga dirancang untuk menghadapi dan menanggulangi situasi darurat yang mungkin terjadi.

2.3 Pengertian Lanjut Usia

Lansia merupakan salah satu tahapan kehidupan yang akan dialami dari seriap manusia, meskipun usianya bertambah seiring dengan berjalannya waktu fungsi organ tubuh menurun, namun orang tua masih bisa menjalani hidup sehat.

Menurut Emmelia Ratnawati (2022:8), “Lansia adalah seseorang yang telah berusia lebih 60 tahun dan tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari”.

Menurut Sari (2021:123), “Lansia adalah individu yang telah memasuki fase kehidupan di mana mereka sering kali membutuhkan dukungan lebih dalam aktivitas sehari-hari”.

Menurut Nurul Mawaddah (2020:49), “Lansia merupakan suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya bisa dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah, yang berarti seseorang akan melewati tiga tahap dalam kehidupannya yaitu masa anak, dewasa dan juga tua”. Maka dapat disimpulkan bahwa lansia adalah fase kehidupan yang dialami oleh setiap individu manusia, biasanya dimulai setelah usia 60 tahun. Meskipun fungsi organ tubuh cenderung menurun seiring bertambahnya usia, lansia masih memiliki potensi untuk menjalani hidup yang sehat, meskipun lansia sering kali tidak mampu mencari nafkah sendiri, sehingga mereka memerlukan dukungan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. lansia juga sering membutuhkan bantuan lebih dalam aktivitas sehari-hari. Maka proses menjadi tua adalah bagian alami dari siklus kehidupan yang dimulai sejak lahir dan melibatkan tiga tahap utama: anak, dewasa, dan tua. Secara keseluruhan, lansia merupakan fase yang memerlukan perhatian dan dukungan khusus untuk memastikan kualitas hidup yang baik.

2.3.1. Ciri-Ciri Lanjut Usia

Menurut Oktora dan Purnawan I. (2018:168), adapun ciri dari lansia di antaranya:

1. Lansia merupakan periode kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor fisik dan faktor psikologis sehingga motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada lansia. Misalnya lansia yang memiliki motivasi yang rendah dalam melakukan kegiatan, maka akan mempercepat proses kemunduran fisik, akan tetapi ada juga lansia yang memiliki motivasi yang tinggi, maka kemunduran fisik pada lansia akan lebih lama terjadi.
2. Penyesuaian yang buruk pada lansia perilaku yang buruk terhadap lansia membuat mereka cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk sehingga dapat memperlihatkan bentuk perilaku yang buruk. Akibat dari perlakuan buruk itu membuat penyesuaian diri lansia menjadi buruk pula. Contohnya lansia yang tinggal bersama keluarga sering tidak dilibatkan untuk pengambilan keputusan karena dianggap pola pikirnya kuno, kondisi inilah yang menyebabkan lansia menarik diri dari lingkungan, cepat tersinggung dan bahkan memiliki harga diri yang rendah.

2.3.2. Karakteristik Lanjut Usia

Karakteristik lanjut usia menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2017 yaitu:

1. Seseorang dikatakan lansia ketika telah mencapai usia 60 tahun keatas.
2. Kebutuhan dan masalah yang bervariasi dari rentang sehat sampai sakit, kebutuhan biopsikososial dan spiritual, kondisi adaptif hingga maladaptive.

3. Lingkungan tempat tinggal yang bervariasi.

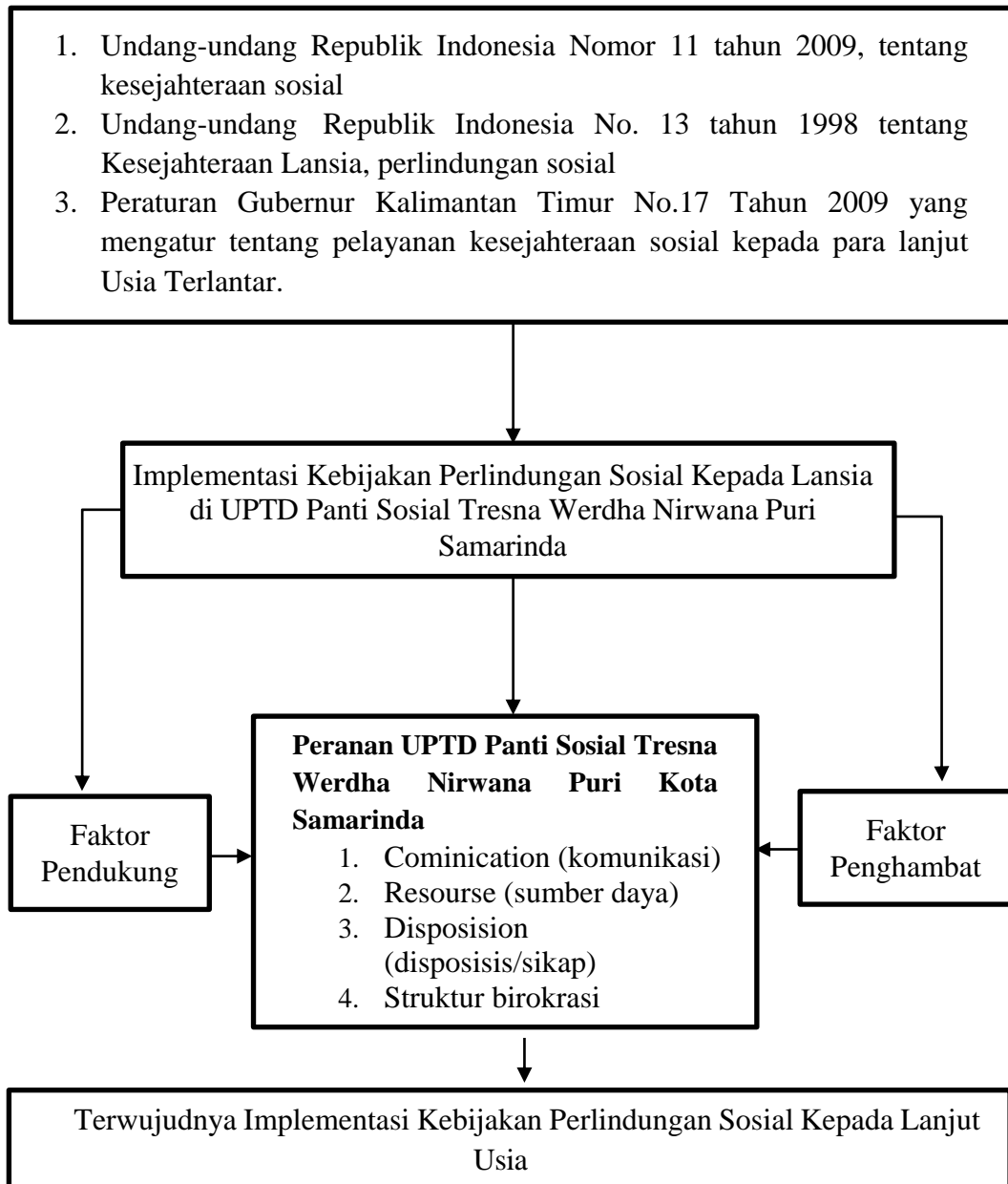
2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan mewakili suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan antara konsep-konsep tersebut. Berikut pendapat dari ahli mengenai pengertian dari kerangka pikir.

Menurut Hardani (2020:321-322) “Kerangka pemikiran dapat dikatakan sebagai rumusan masalah yang di dasarkan pada proses deduktif untuk menghasilkan beberapa konsep dan proporsi yang digunakan dalam merumuskan hipotesis penelitiannya”. Selanjutnya Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kemudian menurut Abdullah (2015:171) “Kerangka pikir hasil sintesa dari proses berpikir deduktif dan induktif dengan kemampuan kreatif menghasilkan konsep dan ide baru, jadi kerangka pemikiran ialah bentuk konseptual dari model dan gambar yang menjelaskan variabel dengan banyak faktor yang menghasilkan beberapa konsep dan proporsi yang digunakan dalam merumuskan hipotesis penelitiannya.”Berdasarkan pendahuluan dari landasan teori yang diuraikan diatas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini.”

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Disusun : Oleh Peneliti 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jadwal Penelitian

Pada umumnya suatu kegiatan dilakukan berdasarkan perencanaan, karena jika adanya perencanaan suatu kegiatan akan berjalan dengan baik atau berjalan dengan sistematis. seperti halnya dalam penelitian tersebut. Adapun teori-teori yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

Menurut V. Wiranta Sujarweni (2014:73), “Waktu peneliti adalah tanggal, bulan, dan tahun, dimana peneliti dilakukan”. Sedangkan menurut Sugiyono (dalam Andi Prastowo, 2016:47) menjelaskan bahwa “Jangkauan waktu peneliti kualitatif adalah bersifat penemuan”.

Selanjutnya menurut Andi Prastowo (2016:284) “Jadwal penelitian adalah salah satu komponen dalam proposal penelitian yang berisi waktu dan kegiatan selama penelitian, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan”.

Kegiatan penelitian hendaknya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. oleh karena itu perlu menyusun jadwal penelitian secara terperinci yang lainnya. oleh karena itu perlu menyusun jadwal penelitian secara terperinci yang dimana jadwal penelitian tersebut secara jelas menggambarkan susunan tahapan dalam penelitian. Agar penelitian dapat dilaksanakan secara lancar dan tepat waktu, perlu adanya pembagian dari beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Okt-24	Nov-24	Des-24	Apr-25	Jun-25	Juni-25
1	Observasi						
2	Pengajuan dan Persetujuan Judul						
3	Penyusunan Proposal						
4	Penelitian Lapangan						
5	Seminar						
6	Pendadaran/Ujian Komprehensif						

Sumber Data : Diolah Oleh Peneliti 2025

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun pendapat para ahli mengenai pengertian jenis penelitian akan dibahas lebih lanjut dibawah berikut:

Menurut Sugiyono (2015:347), “Penelitian Kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivism* atau *enterpretif* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai eksperimen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif telah menekankan makna daripada generalisasi”.

Menurut Eko Sugiarto (2015:53), “Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian dan teman-temannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala holistik-kontektual

melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. peneliti kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif”.

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (dalam Andi Prastowo, 2016:2015), “Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri”.

Berdasarkan landasan teori atas, maka penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dengan cara yang sistematis dan terorganisasi, menciptakan gambaran yang jelas tentang objek studi melalui pengumpulan data yang relevan dan analisis yang tepat.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau area di mana penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian sangat penting karena dapat mempengaruhi hasil dan validitas penelitian. Menurut Wiratna Sujarweni (2014:73) , “Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan”.

Menurut Moleong (2018:127) Menjelaskan bahwa “Dalam memilih suatu lokasi penelitian diarahkan oleh suatu teori secara empiris yang kemudian dirumuskan ke dalam bentuk data yang bersifat sementara”.

Dari uraian teori diatas, Penelitian ini dilakukan di UPTD Dinas Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri, Jl. Mayjend Sutoyo No.1, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

3.4 Definisi Konsepsional

Dalam penelitian, seorang peneliti harus membuat konsep yang akan diteliti. hal tersebut dilakukan agar maksud peneliti ini jelas mengetahui arah, maksud dan tujuan.

Menurut Ulber Sillahi (2018:118) menjelaskan bahwa “Konsepsional atau teoritis dapat diartikan sebagai definisi yang menggambarkan konsep menggunakan konsep-konsep lain”.

Selanjutnya menurut Lexy J. Moleong (2021:63) menyatakan “Konseptual adalah upaya untuk menentukan atau membentuk teori baru dengan 2 (dua) ciri konsep yakni analitik dan peka. Analitik artinya penyimpulan yang dilakukan secukupnya sehingga dimanfaatkan untuk memperkirakan karakteristik suatu kebutuhan yang konkret, namun bukan untuk keutuhan itu sendiri. Lalu peka diartikan sebagai pemberi gambaran yang bermakna, yang diperjelas dengan gambaran yang memungkinkan seseorang menangkap kerangka pengalamannya sendiri”.

Dengan demikian definisi konsepsional merupakan tahapan memberikan batasan mengenai suatu istilah yang diperlukan dalam peneliti ini. sesuai dengan judul peneliti ini. sesuai dengan judul penelitian skripsi ini maka definisi konsepsional mengenai UPTD Panti Tresna Werdha Nirwana Puri adalah kegiatan atau program-program yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lanjut usia terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dan meliputi: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap, Struktur Birokrasi.

3.5 Fokus Penelitian

Adapun tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar informasi atau data yang diperoleh dilapangan lebih jelas.

Menurut Sugiyono (2015:290) “Fokus penelitian merupakan batasan masalah”. Selanjutnya menurut Ali dalam Andi Prastowo (2016:134) “Membatasi masalah penelitian adalah upaya pembatasan dimensi masalah atau gejala agar jelas ruang lingkup dan batasan yang akan diteliti”.

Selanjutnya menurut Spradley dalam Sugiyono (2020:57) “Fokus itu merupakan fenomena/domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial”.

Berdasarkan penjelasan fokus penelitian diatas, yang dimaksudkan dengan fokus penelitian adalah untuk membatasi studi yang akan diteliti sehingga memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mengelola data.

Maka dari itu, yang menjadi fokus pada penelitian ini dengan judul “Peranan UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Kota Samarinda dalam Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kepada Lanjut Usia Terlantar” . adalah:

1. Meliputi Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Kepada Lansia di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda.
 - a. *Communication* (komunikasi)
 - b. *Resources* (sumber daya)
 - c. *Disposition* (disposisi/sikap)
 - d. Struktur birokrasi

2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat peranan UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda.

3.6 Sumber Data

Sumber data merujuk pada tempat atau cara di mana informasi atau data diperoleh untuk keperluan penelitian atau analisis. Sumber data dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Lofland dalam Lexy J. Moleong (2018:157) “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya”. Sedangkan menurut Suharsini Arikunto (2014:172). “Sumber data yang dimaksud dalam peneliti adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”.

Menurut Sugiyono (2014:53), “*Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau dia yang sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk meneliti objek atau situasi sosial yang diteliti”. Maka dapat disimpulkan bahwa Sumber data dalam penelitian, terutama penelitian kualitatif, terdiri dari kata-kata dan tindakan sebagai data utama, sumber data merujuk pada subjek dari mana data diperoleh. Adapun *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang mempertimbangkan individu yang paling mengetahui tentang topik yang diteliti atau yang memiliki otoritas dalam situasi sosial tersebut. Dengan demikian, pemilihan sumber data yang tepat sangat penting untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam dalam penelitian.

3.6.1. Data Primer

Menurut V.Wiratna Sujarweni (2019:80), “Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber“. data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. selanjutnya menurut Nanang Martono (2015:65) “Data primer didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian melalui informan atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan secara langsung”.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2018:137), “Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data, data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Pengumpulan data primer pada penelitian ini didapatkan melalui kegiatan wawancara bersama *Key Informant* dan *Informan* pada penelitian. teknik sampling yang digunakan untuk menentukan *Key Informant* dan Informan adalah *purposive sampling*.

Berdasarkan kriteria informan dan *keyt informan* di atas maka yang menjadi informan dan informan kunci (*key informant*) dalam penelitian ini yaitu :

1. *Key Informant*

Key Informant yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang yang dianggap penting dan paling mengetahui mengenai apa yang peneliti harapkan berupa data-data, informan dan lain sebagainya, sehingga memudahkan

penelitian menjelajahi objek dan atau situasi atau fenomena sosial yang diteliti.

2. Informan

Yaitu seseorang atau orang yang mengetahui serta memberikan tanggapan tentang permasalahan yang terkait dengan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi informan atau penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Data *Key Informant* dan *Informant*

Tabel 2. Data <i>Key Informant</i> dan Informan				
No	Nama	Jabatan	Keterangan	Teknik
1.	Sri Wahyuni, S.E	Kepala UPTD	<i>Key Informant</i>	<i>Purposive sampling</i>
2.	Abdullah, S.Ap	Pelaksana Tugas	<i>Informant</i>	<i>Purposive sampling</i>
3.	Erik Kharuddin	Pelaksana Harian	<i>Informant</i>	<i>Purposive sampling</i>
4.	Hidayat	Klien	<i>Informant</i>	<i>Purposive sampling</i>

Sumber Data : Disusun oleh peneliti 2025

3.6.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer. Data sekunder menurut Sugiyono (2018:137), “Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong (2015:163) adalah “Orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui persoalan yang

akan diteliti”.

Selanjutnya menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2015:143) mengatakan bahwa, “Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Kota Samarinda, meliputi data, dokumentasi dan laporan terkait peran UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Kota Samarinda dalam memberikan pelayanan sosial. Layanan kesejahteraan bagi lansia terlantar.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diharapkan maka dalam suatu penelitian diperlukan teknik pengumpulan data, dimana dalam melakukan teknik pengumpulan data harus diselesaikan dengan data yang dibutuhkan. Menurut Suwartono (2014:58) “Teknik pengumpulan data adalah teknik berbagai cara yang dipakai untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil data penelitian, teknik pengumpulan data digunakan untuk menggali informasi data lebih mendalam”.

Kemudian menurut Lexy J. Moleong (2014:58) “Teknik pengumpulan data ialah cara atau strategi dalam menghasilkan data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan”. Selanjutnya menurut Sugiyono (2018:224) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang

akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data adalah langkah dalam mengumpulkan, menjanging, dan menghimpun data dengan menggunakan teknik tertentu untuk memperoleh data lebih mendalam. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2019:238 “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting dalam proses-proses pengamatan dan ingatan”. Selanjutnya menurut Nasution dalam Sugiyono (2020:106) “Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi”. Kemudian menurut Zuchri Abdussamad (2021:147) “Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa observasi suatu kegiatan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala atau fenomena yang akan diteliti.

2. Wawancara

Menurut Nanang Martono (2015:362) “Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan

kepada informan”. Selanjutnya menurut Lexy J, Moloeng (2018:186) “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan”. Kemudian menurut Sugiyono (2020:114) “Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.

Berdasarkan menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan suatu komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan data dengan caranya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020:124) “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif”. Selanjutnya menurut Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong (2018:216) “Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film”.

Kemudian menurut Suharsimi Arikunto (20219:201) “Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki Barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagiannya”. Dan dapat disimpulkan bawah Teknik

pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang masing-masing memiliki keunggulan untuk mendapatkan data yang relevan, mendalam, dan akurat dalam suatu penelitian.

3.8 Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menyimpulkan informasi yang telah dikumpulkan selama penelitian. Menurut Sugiyono (2020:25) "Analisis data adalah proses memilih, memilah dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam, bermakna, unik, dan berupa temuan baru, yang bersifat deskriptif, kategorisasi atau pola-pola hubungan antar kategori dari obyek yang diteliti".

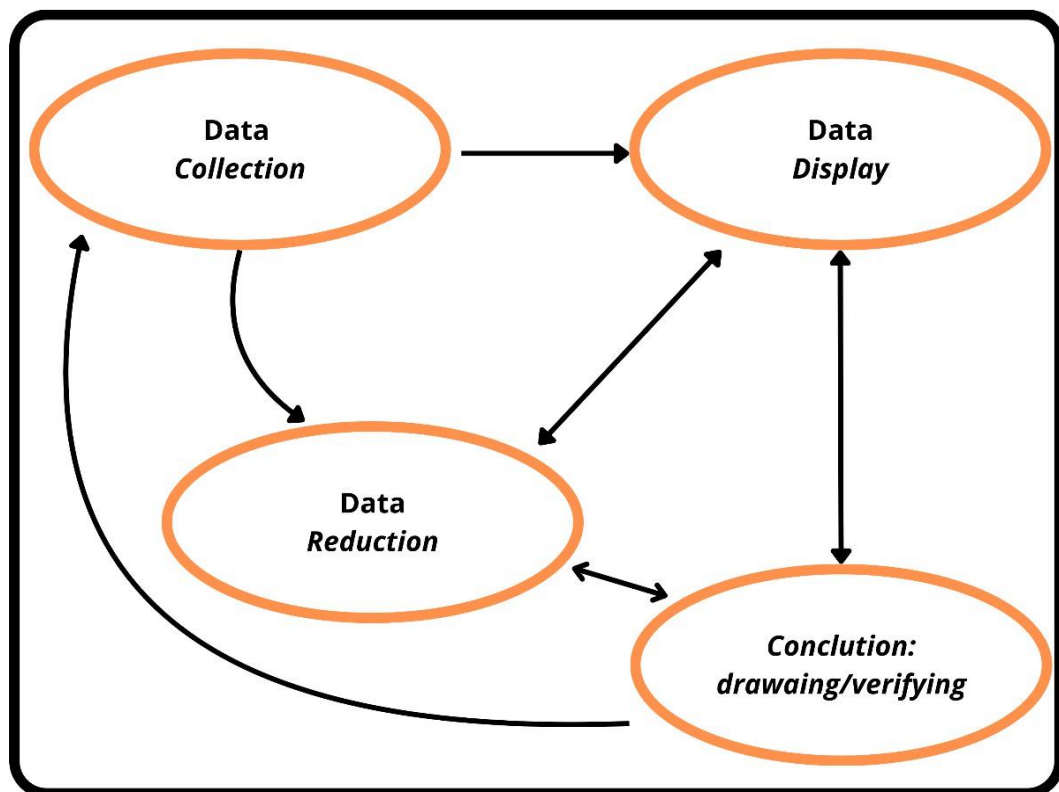
Selanjutnya menurut Bogdan dalam Lexy J. Moleong (2018:248) "analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain". Kemudian menurut Nanang Martono (2015:10) "analisis data merupakan proses pengelolaan, penyajian, interpretasi, dan analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna, sehingga mendapatkan hasil penelitian".

Berdasarkan pendapat para ahli, analisis data adalah proses pengelompokan data yang diperoleh, misalnya melalui wawancara, ke dalam

kategori sesuai dengan tema tertentu. Proses ini dilakukan agar data lebih mudah dipahami dan dapat disampaikan secara informatif kepada pihak lain. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:246) yang menggunakan model pola interaktif. Yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

Gambar 3.1

Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman



Sumber Sugiyono (2020:134)

Berikut penjelasan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya

(triangulasi). Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang banyak dan bervariasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Panti Tresna Werdha Nirwana Puri yang berlokasi di jalan Mayjend Sutoyo Samarinda, sebelumnya adalah Unit Pelaksanaan Teknis Departemen Sosial Republik Indonesia, seiring berjalannya waktu dan Era Otonomi Daerah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2001 Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2009 mengenai Organisasi dan Tata Kerja dari UPTD pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang dimana memberikan pelayanan kesejahteraan bagi lanjut usia terlantar.

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Mempunyai luas tempat kurang lebih 22.850 M² di lengkapi dengan sarana dan prasarana memiliki jumlah 37 bangunan dan sumber daya manusia sebanyak 61 orang, serta mampu melayani klien dengan jumlah 120 orang sesuai tampung daya yang ada. Agar mencapai tujuan dan sasaran selalu didasarkan dengan adanya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial beserta peraturan lain, agar lanjut usia dapat menikmati sisa hidup yang tenang lahir batin serta mampu melaksanakan fungsi sosial secara baik.

4.2 Profil UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda

Aparatur UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda terdiri dari Kepala UPTD yang menjabat sejak 2022. Jabatan Kasubbag Tata Usaha, Pembinaan dan Terminasi, serta Penyantunan dan Pelayanan mulai diisi sejak 2023. Sementara itu, tenaga fungsional memiliki periode kerja yang beragam karena penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan layanan dan keahlian tertentu. Beberapa telah bertugas sebelum 2022, lainnya baru bergabung setelahnya. Keberadaan tenaga fungsional ini sangat mendukung layanan teknis bagi lansia sesuai kompetensinya. Adapun jumlah aparatur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Aperatur Sipil Negara UPTD PSTW Samarinda

No.	Unit Kerja	Jenis Personil	
		ASN	NON ASN
1.	Kepala UPTD	1	-
2.	KaSubbag Tata Usaha	7	8
3.	Pembina & Terminasi	5	23
4.	Penyantun & Pelayanan	9	7
5.	Tenaga Fungsional	2	-
Jumlah		24	38

Sumber Data : Profil UPTD PSTW Samarinda 2025

Jumlah aparatur di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Kota Samarinda terdiri dari 24 ASN dan 38 Non-ASN, yang mencakup Kepala UPTD, Kasubbag Tata Usaha, Pembinaan dan Terminasi, Penyantunan dan Pelayanan, serta tenaga fungsional.

Berdasarkan sarana yang tersedia di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Kota Samarinda dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Sarana UPTD PSTW Samarinda

No.	Uraian	Jumlah (Unit)
1.	Kantor	1
2.	Klinik	1
3.	Aula	1
4.	Musholla	1
5.	Ruang Keterampilan	1
6.	Pos Jaga	2
7.	Tempat Parkir	1
8.	Wisma Klien/Asrama Klien	17
9.	Ruang Isolasi	1
10.	Dapur Umum	1
11.	Rumah Dinas	8
12.	Bangunan Gudang	2
13.	Rumah Duka	1
14.	Lapangan Senam/ Tenis	1
15.	Lapangan Bulu Tangkis	0
16.	Gazebo	1
17.	Ruang Arsip / Ruang Mawar Lama	1

Sumber Data : Profil UPTD PSTW Samarinda 2025

Berdasarkan tabel di atas sarana yang tersedia di UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Kota Samarinda berjumlah 41 unit.

Berdasarkan prasarana yang tersedia di UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Kota Samarinda dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Prasarana UPTD PSTW Samarinda

No	Uraian	Jumlah (Unit)
1.	Mobil Ambulance	1
2.	Mobil Operasional	2
3.	Mobil Jabatan	1
4.	Sepeda Motor	3
	Jumlah	7

Sumber Data : Profil UPTD PSTW Samarinda 2025

Berdasarkan tabel di atas, UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Kota Samarinda memiliki 7 unit prasarana, terdiri dari 1 mobil ambulans, 2 mobil operasional, 1 mobil jabatan, dan 3 sepeda motor.

Jumlah lanjut usia di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Kota Samarinda tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Lanjut Usia di UPTD PSTW Samarinda

No	Uraian	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-Laki	75
2.	Perempuan	58
	Jumlah	133

Sumber Data : Profil UPTD PSTW Samarinda 2025

Berdasarkan jumlah lanjut usia di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Kota Samarinda berjumlah 133 jiwa dengan mayoritas berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 60 jiwa sedangkan perempuan dengan jumlah 55 jiwa.

4.3 Visi dan Misi UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Kota Samarinda mempunyai visi “Pelayanan Terbaik Untuk Menjadikan Lanjut Usia Bahagia dan Sejahtera Di Usia Tua”.

Agar mencapai visi tersebut perlu dilakukan suatu misi yang berupa kegiatan jangka panjang dengan arah yang jelas. Ini beberapa misi yang di rumuskan berdasarkan visi di atas:

1. Memberikan pelayanan secara optimal dan komprehensif bagi terwujudnya kebutuhan fisik dan psikis bagi para lanjut usia.
2. Meningkatkan apresiasi dengan peran serta masyarakat dalam memposisikan lanjut usia secara wajar sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

4.4 Keadaan Sumber Daya Manusia

Organisasi pada hakekatnya adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki, di mana selalu ada hubungan antara seseorang yang disebut pimpinan dengan sekelompok orang yang disebut sebagai bawahan. Suatu organisasi perkantoran dalam melaksanakan kegiatannya. baik kantor pemerintah maupun swasta akan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai satu hal yang harus diperhatikan bersama yaitu bahwa keberhasilan berbagai aktivitas didalam kantor dalam mencapai tujuan bukan hanya tergantung pada, keunggulan teknologi dana operasi yang tersedia, sarana ataupun prasarana yang dimiliki melainkan juga tergantung pada kepemimpinan dalam berorganisasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam berorganisasi dan mewujudkan keberhasilan organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama.

4.5 Tujuan Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri

1. Membantu masyarakat, keluarga dalam memenuhi kebutuhan lanjut usia baik jasmani, rohani, sosial emosional dan intelektual serta teratasinya masalah-masalah akibat usia lanjut.
2. Terlindungnya lanjut usia dari hal-hal yang membahayakan diri mereka.
3. Menghindarkan para lanjut usia dari ketelantaran dalam berbagai aspek.

4. Membantu para lanjut usia dengan pola hidup sehat, aktif, dan produktif serta harmonis.

4.6 Fungsi Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri

1. Sebagai pengganti fungsi keluarga.
2. Sebagai salah pusat informasi dan komunikasi pelayanan kesejahteraan lanjut usia terlantar.
3. Sebagai salah satu unit pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia terlantar/bermasalah.
4. Merumuskan kebijakan teknis pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.
5. Perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar secara objektif dan antisipatif.

4.7 Penyajian Data Hasil Penelitian

Penyajian data dan hasil penelitian untuk selanjutnya dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan. Data dari hasil penelitian tersebut yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber penelitian yaitu data wawancara yang menyangkut Peranan UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Kota Samarinda Dalam Kebijakan Implementasi Perlindungan Sosial Kepada Lansia Di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda.

Berikut peneliti akan menyajikan data dari hasil wawancara dengan key informan Ibu Sri Wahyuni S.E selaku Kepala UPTD dan informan yaitu Bapak Muhammad Aswari, S.Sos selaku Kasubbag Tata Usaha, dan Bapak Budi

Darmanto, S.Sos selaku Kasi Penyantunan dan Pelayanan dan 1 klien/lanjut usia dijabarkan sebagai berikut:

4.7.1 Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Kepada Lansia Di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. Berkaitan dengan pertanyaan Apa saja kebijakan yang digunakan terutama kebijakan dari pemerintah provinsi ? Sebagaimana disampaikan oleh Kepala UPTD Ibu Sri Wahyuni selaku *key informant* dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Kebijakan yang utama digunakan dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2024. Aturan ini menjadi dasar pembentukan dan pengelolaan UPTD PSTW Nirwana Puri. Ada juga kami mengacu pada beberapa undang-undang seperti UU Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan UU Nomor 43 Tahun 2004 terkait peningkatan kesejahteraan sosial lansia. Semua kegiatan kami, mulai dari pelayanan hingga pembinaan, mengikuti pedoman tersebut.” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya disampaikan oleh bagian Pelaksana Tugas Bapak Abdullah.

S. Ap dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa: “Jika dari sisi operasional, kami mengacu pada Peraturan Gubernur terbaru Nomor 15 Tahun 2024 yang mengatur struktur organisasi dan tugas-tugas teknis kami. Itu jadi rujukan utama, apalagi dalam menjalankan program pembinaan dan penyantunan lansia yang terlantar. (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya disampaikan oleh bagian Pelaksana harian Bapak Erik Kaharuddin dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Kami di bagian penyantunan dan pelayanan lansia bekerja berdasarkan arahan dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2024. Kebijakan ini mengatur tugas teknis kami, mulai dari penyediaan makanan

harian, bimbingan sosial, sampai pelayanan kesehatan rutin. Selain itu kami juga menyesuaikan dengan kebutuhan klien secara individu agar layanan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Berkaitan dengan pertanyaan wawancara Bagaimana Implementasi Kebijakan Sosial Perlindungan Sosial di dalam panti ini ? Sebagaimana disampaikan oleh Kepala UPTD Ibu Sri Wahyuni SE. selaku *key informant* dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Implementasi kebijakan perlindungan sosial di panti ini mengacu langsung pada Standar pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan yang berlaku. Kami memastikan semua lansia binaan mendapatkan hak-haknya secara menyeluruh, meskipun ada beberapa yang perlu ditingkatkan, seperti pemeliharaan asrama dan alat bantu. “ (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya disampaikan oleh bagian Pelaksana Tugas Bapak Abdullah,

S. Ap dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Dari sisi administrasi dan pendukung operasional, kami memastikan segala bentuk layanan dan pemenuhan kebutuhan lansia dilakukan secara tertib, mulai dari pengelolaan anggaran hingga pengadaan kebutuhan. Anggaran untuk tahun 2024 kemarin cukup mendukung, dengan sekitar 77% bersumber dari APBD Provinsi. kami juga disini melakukan evaluasi rutin terhadap capaian SPM agar implementasi kebijakan berjalan sesuai target.” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya disampaikan oleh bagian Pelaksana harian Bapak Erik

Kharuddin dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Kami Fokus pada pelayanan langsung kepada lansia, termasuk pemenuhan permakaman, sandang, kesehatan, dan bimbingan sosial. Beberapa capaian sudah mendekati atau bahkan mencapai target, seperti pemenuhan sandang dan keterampilan hidup dan ada beberapa layanan seperti reunifikasi keluarga dan alat bantu masih masih menghadapi kendala teknis maupun administratif.” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selain dari hasil wawancara peneliti mengambil data berupa program kerja dan realisasi kerja SPM:

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri memiliki tanggung jawab untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi lanjut usia (lansia) binaan panti. Pelayanan yang diberikan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan selaras dengan kebijakan perlindungan sosial yang diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2024. Peraturan Gubernur tersebut menegaskan bahwa salah satu fungsi utama UPTD adalah memberikan pelayanan rehabilitas sosial, memenuhi kebutuhan dasar, pemberdayaan, advokasi, serta pemeliharaan martabat bagi kelompok rentan, termasuk lansia. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri telah memiliki 12 jenis pelayanan dasar yang menjadi program kerja bagian dari implementasi langsung kebijakan perlindungan sosial yaitu, pemakaman, sandang, asrama yang mudah diakses, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, bimbingan keterampilan, fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akses layanan dasar, pelayanan penelurusan keluarga, pelayanan reunifikasi keluarga, pemulasaraan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari bulan Januari hingga September tahun 2024. Meskipun skripsi ini disusun pada tahun 2025, data tahun 2024 dipilih karena merupakan data paling terbaru yang tersedia secara lengkap dan resmi dari UPTD Perlindungan Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda pada saat proses pengumpulan data dilakukan. Adapun data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diperoleh dari UPTD Perlindungan Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri adalah sebagai berikut, berdasarkan periode Januari sampai dengan September tahun 2024:

Tabel 4.5 Jenis dan Standar Pelayanan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Bulan Capaian
		Indikator	Realisasi Pencapaian SPM	
1.	Penyediaan Pemakaman	Persentase (%) lanjut usia binaan panti (klien) yang terpenuhi kebutuhan pemakaman didalam panti	73,92%	Januari s/d September 2024
2	Penyediaan Sandang	Persentase (%) lanjut usia binaan panti (klien) yang terpenuhi kebutuhan sandang di dalam panti	100%	Januari s/d September 2024
3	Asrama yang Mudah Diakses	Persentase (%) Pemeliharaan gedung arama lansia binaan Panti	0%	Januari s/d September 2024
4	Alat Bantu	Persentase (%) lanjut usia binaan panti (klien) yang terpenuhi kebutuhan alat bantu	0%	Januari s/d September 2024
5	Perbekalam Kesehatan	Persentase (%) lanjut usia binaan panti (klien) yang terpenuhi kebutuhan perbekalan kesehatan	63,20%	Januari s/d September 2024
6	Bimbingan Fisik	Persentase (%) lanjut usia binaan panti (klien) yang terpenuhi kebutuhan bimbingan fisik	41,73%	Januari s/d September 2024
7	Bimbingan Keterampilan	Persentase (%) lanjut usia binaan panti (klien) yang terpenuhi kebutuhan bimbingan keterampilan	99,99%	Januari s/d September 2024

Lanjutan Tabel 4.5 Jenis dan Standar Pelayanan

8	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Persentase (%) lanjut usia binaan panti (klien) yang terpenuhi kebutuhan fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan	0%	Januari s/d September 2024
9	Akses Layanan Kesehatan Dasar	Presentase (%) lanjut usia binaan panti (klien) yang terpenuhi kebutuhan Akses ke layanan kesehatan dasar	0%	Januari s/d September 2024
10	Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase (%) lanjut usia binaan panti (klien) yang terpenuhi kebutuhan pelayanan penelusuran keluarga	39,09%	Januari s/d September 2024
11	Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Presentase (%) Lanjut usia Binaan Panti (klien) yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan reunifikasi keluarga	0%	Januari s/d September 2024
12	Pemulasaraan	Presentase (%) lanjut usia binaan panti (klien) yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraan	78,16%	Januari s/d September 2024

Beberapa program yang menunjukkan capaian yang sangat baik di antaranya :

1. Penyediaan Sandang (100%)

Program ini berhasil memenuhi kebutuhan pakaian seluruh lansia binaan. Capaian ini menunjukkan implementasi dari perlindungan hak dasar lansia, yaitu hak atas pakaian yang layak. dengan fungsi UPTD dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2004 dan kebijakan nasional melalui permensos tentang SPM layanan sosial.

2. Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari (99,99%)

Bimbingan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lansia dalam

melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Program ini mencerminkan pelaksanaan fungsi rehabilitas dan pemberdayaan sosial yang diamanatkan dalam kebijakan perlindungan sosial, serta menunjukkan bahwa lansia tidak hanya dipelihara secara fisik, tetapi juga didorong untuk tetap produktif dan bermartabat.

3. Pemulasaraan (78,16%)

Meskipun belum mencapai target 82% layanan kesehatan pemulasaraan yang diberikan kepada lansia yang meninggal dunia merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia di akhir hayat. Layanan ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial juga mencakup aspek spritual dan penghormatan terhadap hak-hak dasar hingga akhir usia.

Keberhasilan ketiga program ini mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan sosial yang berbasis pada pendekatan hak, bukan sekedar bantuan. UPTD tidak hanya menyediakan layanan dasar, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan, pemulihan, dan pemberdayaan sosial bagi lansia. Program kerja UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri bukan hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga secara langsung mewujudkan amanat Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2024, serta kebijakan perlindungan sosial nasional. ini menjadi bukti bahwa pelayanan sosial di tingkat daerah dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan kesejahteraan khususnya lansia.

4.7.1.1 Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Kepada Lansia Di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. Berkaitan dengan pertanyaan Apa bentuk komunikasi yang

diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial bagi lansia di panti ini ? Sebagaimana disampaikan oleh Kepala UPTD Ibu Sri Wahyuni selaku *key informant* dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Kami disini menerapkan komunikasi dua arah yang bersifat terbuka dan partisipasi. Kami tidak hanya memberikan informasi kepada para lansia, tetapi juga mendengarkan aspirasi dan keluhan mereka. Ada juga pertemuan rutin antara staf dan penghuni panti kami lakukan setiap bulan untuk mengevaluasi pelayanan. Kami juga menggunakan pendekatan personal, agar setiap lansia merasa diperhatikan secara individu.” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya disampaikan oleh bagian Pelaksana Tugas Bapak Abdullah,

S. Ap dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Bentuk komunikasi yang kami terapkan lebih ke administratif dan koordinatif. kami memastikan bahwa informasi terkait program-program perlindungan sosial, bagi yang bersumber dari pusat maupun daerah, tersampaikan dengan baik melalui papan informan dan surat internal. Kami juga aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menjamin kelancaran kegiatan di panti.” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya disampaikan oleh bagian Pelaksana Harian Bapak Erik Kharuddin dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa: “Kami lebih banyak berkomunikasi langsung dengan lansia setiap hari. komunikasinya bersifat informal namun penuh empati, saat mendampingi mereka dalam kegiatan sehari-hari. kalau ada masalah, kami laporkan langsung ke atasan agar segera ditindak lanjuti.” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan wawancara, Bagaimana Mengapa komunikasi yang baik penting dalam implementasi kebijakan perlindungan sosial bagi lansia ? Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala UPTD Ibu Sri Wahyuni SE. selaku *key informant* dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Karna komunikasi yang baik adalah kunci utama agar setiap kebijakan bisa dipahami dan diterima dengan baik oleh semua pihak, terutama oleh para lansia. jadi pendekatan yang tepat sangat dibutuhkan. karna tanpa komunikasi yang jelas, bisa terjadi kesalahpahaman yang justru dapat merugikan. jadi kami selalu mengedepankan komunikasi yang terbuka, jelas, dan penuh empati dalam setiap pelaksanaan kebijakan.” (Sumber wawancara, Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya disampaikan oleh bagian Pelaksana Tugas Bapak Abdullah,

S. Ap dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Kalau untuk tata kelola administrasi dan pelaksanaan program, komunikasi ini menjadi penghubung antar bagian. Jika ada miskomunikasi, maka pelaksanaan program perlindungan sosial bisa terhambat. Lansia juga perlu informasi secara tepat agar mereka tahu hak dan layanan apa saja yang ada. Jadi komunikasi yang baik memastikan tidak ada informasi yang tertinggal atau salah tafsir.” (Sumber wawancara, Selasa 22 April 2025).

Selanjutnya disampaikan oleh bagian Pelaksana harian Bapak Erik

Kharuddin dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Setiap hari kami selalu berinteraksi langsung dengan lansia, jadi kami tahu pentingnya komunikasi yang hangat dan bisa dipahami. kalau komunikasi buruk, lansia bisa merasa diabaikan atau bahkan stres bahkan lansia bisa nekat untuk kabur dari panti dengan alasan tidak betah. Padahal tujuan perlindungan sosial ini adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka. Dengan komunikasi yang baik” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan wawancara, Apakah di sini ada fasilitas untuk menerima keluhan/masukan untuk lansia ? Sebagaimana yang disampaikan oleh lansia bapak Hidayat selaku klien dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa: “Ada, kalau ada yang saya mau sampaikan, saya cerita ke petugas di sini, disini juga ada pertemuan bersama, jadi saya mengungkapkan disana, saya pernah minta bantal tambahan dan diberikan oleh petugas di sini” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

4.7.1.2 Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kebijakan Implementasi Perlindungan Sosial Kepada Lansia Di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. Berkaitan dengan pertanyaan Berapa komposisi SDM di panti sosial ini (jumlah, jenis profesi, kualifikasi) ? Sebagaimana disampaikan oleh Kepala UPTD Ibu Sri Wahyuni selaku *key informant* dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Saat ini, jumlah total SDM 62 orang, dari 24 ASN dan 38 Non-ASN. mereka ada di beberapa unit kerja, di Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penyantunan dan Pelayanan, Seksi Pembinaan dan termidasi, serta tenaga fungsional. Tenaga kerja di sini memiliki latar belakang dan kompetensi yang relevan. Untuk tenaga fungsional seperti perawat dan pengasuh, mereka sudah dibekali dengan pelatihan dasar keperawatan lansia dan ada juga berlatar belakang pendidikan keperawatan atau sosial” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya disampaikan oleh bagian Pelaksana Tugas Bapak Abdullah, S.

Ap dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Kalau dari bagian administrasi, kami memantau total SDM di sini adalah 62 orang. Untuk unit Tata usaha sendiri ada 15 orang, sebagian besar non-ASN. Mereka menangani urusan administrasi dan keuangan, kami juga disini mengandalkan kerja sama lintas unit, karena kebutuhan di panti sangat kompleks. kualifikasi staf pun bervariasi, namun semua diarahkan untuk mendukung pelayanan sosial lansia secara optimal.” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya disampaikan oleh bagian Pelaksana harian Bapak Erik

Kharuddin dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Untuk penyantunan dan pelayanan sendiri terdapat 5 ASN dan 23 non-ASN. Seperti perawatan harian, pendamping, dan pemberian kebutuhan dasar. Rata-rata pengasuh dan staf pelayanan sudah memiliki pengalaman kerja dengan lansia, bahkan ada yang sudah mengabdikan lebih dari 10 tahun” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan wawancara, Apakah dana yang

tersedia mencangkup untuk memenuhi kebutuhan lansia seperti makanan, kesehatan, kegiatan sosial, dll) ? Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala UPTD Ibu Sri Wahyuni SE. selaku *key informant* dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Dana dari pemerintah sudah ada, namun memang belum sepenuhnya mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan lansia. Untuk kebutuhan dasar seperti makanan masih bisa kita penuhi dengan cukup baik. Tapi untuk kebutuhan seperti alat kesehatan, bimbingan mental. dan kegiatan sosial, kami masih sangat terbatas karena itu di sini masih berharap ada bantuan anggaran lagi” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya disampaikan oleh bagian Kasubbag Tata usaha Bapak Muhammad Aswari, S.Sos dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Kami mengelola dana secukup mungkin, kebutuhan makan *alhamdulillah* tercukupi, tapi kalau bicara tentang program-program sosial, kesehatan, itu masih jadi tantangan juga untuk kami. Apalagi beberapa kegiatan rehabilitasi bangunan juga butuh anggaran tersendiri. kita terbatas dari sisi anggaran operasional” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya disampaikan oleh bagian Petugas Harian Bapak Erik Kharuddin dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Kebutuhan dasar seperti makan dan pakaian memang sudah kami sediakan dengan dana yang ada. tapi kalau untuk bimbingan sosial, kegiatan sosial, dan akses kesehatan seperti obat-obatan atau pemeriksa rutin, belum sepenuhnya bisa kami penuhi sesuai standar. Kami sering mengandalkan bantuan dari luar untuk menutupi kekurangan” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan wawancara, Bagaimana kondisi sarana dan prasarana panti sosial ini ? Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala UPTD Ibu Sri Wahyuni SE. selaku *key informant* dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Terkait sarana dan prasarana di panti ini masih dalam proses

pembenahan. Beberapa bangunan ada yang direnovasi, termasuk kamar dan ruang pelayanan. fasilitas masih terbatas, terutama untuk lansia dengan kebutuhan khusus, namun kami berupa agar tetap nyaman dan aman” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya disampaikan oleh bagian Pelaksana Tugas Bapak Abdulah, S. AP dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa: “Prasarana memang belum sepenuhnya memadai. disini juga jumlah kamar masih terbatas dan beberapa belum memenuhi standar kenyamanan. untuk kesehatan juga masih minim, perlu penyesuaian lagi dan dukungan tambahan kedepannya” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya disampaikan oleh bagian Pelaksana harian Bapak Erik Kharuddin dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa: “Kami di sini semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik walaupun fasilitas terbatas. Kamar tidur dan ruang makan sudah ada, tapi alat bantu seperti kursi roda, dan ruang kegiatan masih kurang, fasilitas kesehatan juga belum bisa optimal” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan wawancara, Apakah pengasuh disini cukup untuk lansia, dan apakah lansia sangat terpenuhi kebutuhan mereka ? Sebagaimana yang disampaikan oleh lansia bapak Hidayat selaku klien dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Disini untuk petugasnya banyak, tiap hari ada yang membantu, yang ngasih makan, ngajak ngobrol, sama yang bersihin tempat. saya senang karena mereka sabar semua. Untuk makanan dan obat, sangat cukup sekali, walaupun kadang-kadang obat suka telat. tapi disini ada beberapa gedung yang lagi diperbaiki, jadi kami kadang harus pindah ruangan, tapi saya senang orangnya disini sangat baik-baik.” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

4.7.1.3 Diposisi/Sikap

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kebijakan Implementasi Perlindungan Sosial Kepada Lansia Di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. Berkaitan dengan pertanyaan Apakah saat ini ada imbas dari kebijakan efisiensi dari panti ini ? jika ada bagaimana cara Bapak/Ibu dalam mengelola panti ini menyikapi itu? Sebagaimana disampaikan oleh Kepala UPTD Ibu Sri Wahyuni selaku *key informant* dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Iya tentu ada, jadi kami harus melakukan penyesuaian dalam berbagai aspek pengelolaan. Memastikan untuk pelayanan pokok bagi lansia ini tetap terpenuhi, disini juga lagi mengatur perencanaan keuangan lagi dan pengawasan penggunaan anggaran, agar setiap pengeluaran benar-benar tepat sasaran” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya disampaikan oleh bagian Pelaksana Tugas Abdullah, S. Ap dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Kalau untuk anggaran berpengaruh, terutama di administrasi dan pengadaan barang rutin. jadi kami mengelola lebih berhati-hati lagi dalam pencatatan dan pengaturan belanja, menghindari pemborosan sekecil apapun. jadi kami fokus untuk menjaga agar operasional panti tetap stabil tanpa mengganggu pelayanan untuk para lansia” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya disampaikan oleh bagian Pelaksana Harian Bapak Erik Hidayat dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Ada, dampaknya dalam kegiatan harian, terutama dalam program-program tambahan untuk lansia. Jadi kami memperkuat koordinasi antar staf, mengutamakan pelayanan dasar seperti kesehatan, konsumsi, dan kebersihan. kami juga selalu mencari solusi supaya kegiatan tetap berjalan meskipun dana terbatas” (Sumber wawancara Selasa 22 desember 2025).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kebijakan Implementasi Perlindungan Sosial Kepada Lansia Di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha

Nirwana Puri Samarinda. Berkaitan dengan pertanyaan Apakah kebijakan efisiensi ini berdampak pada kualitas perlindungan sosial bagi lansia ? Sebagaimana disampaikan oleh Kepala UPTD Ibu Sri Wahyuni selaku *key informant* dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Untuk dampaknya sangat membawa tantangan untuk kami, namun kami memastikan bahwa kualitas perlindungan sosial bagi lansia tetap menjadi prioritas utama. kami juga melakukan evaluasi terhadap seluruh program dan memfokuskan sumber daya pada pelayanan yang esensiensi, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan dan perlindungan psikososial. Dengan pengelolaan kami yang ketat dan perencanaan yang matang, sampai saat ini, tidak ada pengurangan kualitas pelayanan inti bagi lansia” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya disampaikan oleh bagian Kasubbag Tata usaha Bapak Abdullah, S. Ap dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Untuk Anggaran memang sangat berpengaruh pada kerja kami, terutama dalam administrasi dan pengelolaan operasional. tetapi kami tetap berusaha keras agar tidak ada dampak langsung terhadap layanan perlindungan sosial ini, jadi kami menghemat di sektor pendukung, bukan di sektor pelayanan langsung sama lansia. Mungkin dengan ini kami berharap layanan bagi lansia tetap terjaga walaupun anggaran masih penyesuaian” (Sumber wawancara Selasa 22, April 2025).

Selanjutnya disampaikan oleh bagian Pelaksana harian Bapak Erik Kharuddin dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Kalau untuk pelayanan, kami usahakan di sini tidak berdampak bagi lansianya, pelayanan makan, dan keamanan, *alhamdulillah* tidak ada pengurangan kualitas. kami selalu berusaha agar lansia merasa aman, sehat, dan terlayani dengan baik agar kualitas perlindungan sosial tetap optimal walaupun dengan dana yang terbatas” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan wawancara, bagaimana makanan, pelayanan dan kesehatan yang diberikan di panti sini , apakah selalu ada perubahan dan apakah menunya sangat cukup dan bergizi untuk Bapak/Ibu ? Sebagaimana yang disampaikan oleh lansia bapak Hidayat selaku klien dalam

wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa: “Pelayanan di sini sangat baik, mereka perhatian sama kami, untuk makanannya juga *alhamdulillah* cukup dan di sini juga kami disediakan dapur kalau ingin masak sendiri. Kesehatan kami selalu di cek selalu. Kami di sini *alhamdulillah* diperlakukan dengan baik” (Sumber wawancara, Selasa 22 April 2025).

4.7.1.4 Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kebijakan Implementasi Perlindungan Sosial Kepada Lansia Di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. Berkaitan dengan pertanyaan Apa saja prosedur birokrasi yang harus dilalui dalam implementasi kebijakan perlindungan sosial bagi lansia ? Sebagaimana disampaikan oleh Kepala UPTD Ibu Sri Wahyuni selaku *key informant* dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Prosedurnya cukup sistematis. Dimulai dari penyusunan rencana teknis operasional sesuai arahan Dinas Sosial Provinsi, Lalu dilanjutkan lagi dengan koordinasi lintas bidang untuk anggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Semua kegiatan mengacu pada regulasi seperti Undang-undang Pekerja Sosial dan Permensos tentang SPM. Evaluasi rutin juga dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai target” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya disampaikan oleh bagian Pelaksana Tugas Bapak Abdullah, S. Ap dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

“Kalau kami harus menyiapkan dokumen-dokumen pendukung mulai dari perencanaan kegiatan, pengajuan anggaran, hingga laporan pertanggung jawaban. Semua itu harus melalui vertifikasi berjenjang-dari unit kami, kemudian ke kepala UPTD, baru diterukan ke Dinas Sosial. Proses ini sangat penting agar tidak ada kesalahan administrasi dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai aturan” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya disampaikan oleh bagian Pelaksana harian Bapak Erik Kharuddin dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Kami pastikan layanan lansia seperti makan, kesehatan, dan bimbingan berjalan sesuai SPM. Kegiatan direncanakan, disetujui, di laksanakan, dan dievaluasi, dengan koordinasi dan pelaporan sebagai bagian penting prosedur. Untuk SPM ada 12 jenis, yaitu ada pemakaman, sandang, asrama yang mudah diakses, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, bimbingan keterampilan, fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akses layanan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan pelayanan reunifikasi keluarga, dan pemulasaraan” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kebijakan Implementasi Perlindungan Sosial Kepada Lansia Di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda. Berkaitan dengan pertanyaan apakah ada prosedur dari panti jika ada lansia yang ingin mengajukan sesuatu seperti kebutuhan mereka? Sebagaimana disampaikan oleh Kepala UPTD Ibu Sri Wahyuni selaku *key informant* dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Tentu ada. Jika lansia memiliki kebutuhan khusus, mereka bisa menyampaikan kepada petugas sosial atau pengasuh. Nanti akan dicatat dan diverifikasi oleh tim, lalu dibahas dalam rapat internal rapat internal sebelum diputuskan apakah bisa dipenuhi sesuai anggaran dan kebijakan yang berlaku.” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya disampaikan oleh bagian Pelaksana Tugas Bapak Abdullah, S. Ap dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa: “Permintaan dicatat dalam formulir, lalu diproses sesuai prosedur administrasi dan anggaran yang berlaku” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya disampaikan oleh bagian Pelaksana harian Bapak Erik Kharuddin dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Biasanya lansia menyampaikan kebutuhannya ke pendamping harian. Kami cek dulu urgensinya dan kecocokannya dengan standar layanan. jika dianggap penting. kami ajukan ke pimpinan. Bila disetujui, kami segera penuhi melalui unit yang terkait tapi untuk saat ini *alhamdulillah* kami selalu bisa penuhi apa kemauan mereka” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan wawancara, Apakah ada prosedur dari panti jika bapa ingin meminta sesuatu yang bapak/ibu butuhkan di panti ini ? Sebagaimana yang disampaikan oleh lansia Bapak Hidayat selaku klien dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Tidak ada, kalau saya butuh sesuatu saya langsung bilang saja ke petugas disini, nanti langsung dikasih, tapi kadang juga harus nunggu dulu. Biasanya saya suka minta belikan makan yang saya pengen apa lagi orag tua seperti saya kadang pengen juga ngerasain makanan diluar jadi saya suka bilang ke petugas.” (Sumber wawancara Selasa, 22 April 2025).

4.8 Pembahasan

Pada bab ini peneliti akan menyajikan data hasil penelitian yang telah diperoleh melalui hasil wawancara dengan *key informant* dan informan tentang Kebijakan Implementasi Perlindungan Sosial Kepada lansia Di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda sebagai berikut:

4.8.1 Kebijakan Implementasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Selasa, 22 April 2025, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sosial perlindungan lansia di UPTD PSTW Nirwana Puri Kalimantan Timur sangat berlandaskan pada regulasi formal, khususnya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2024. Kebijaksanaan ini menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program pelayanan dan penyantunan terhadap lansia bahwa seluruh kegiatan pelayanan, mulai dari administrasi hingga pembinaan sosial, mengikuti pedoman dari peraturan tersebut serta undang-undang nasional seperti UU No. 13 Tahun 1998 dan UU No. 43 Tahun 2004. ini menunjukkan bahwa institusi telah menjalankan kebijakan secara terintegrasi dan mengacu pada standar hukum yang berlaku.

4.8.2 Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda, bahwa komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan sosial bagi lansia. Komunikasi yang diterapkan di lingkungan panti bersifat dua arah, terbuka, partisipasi, serta disesuaikan dengan peran dan fungsi masing-masing petugas. Pola komunikasi ini tidak hanya memfasilitasi proses penyampaian informasi, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang mendukung lahirnya hubungan yang empati antara petugas dan penghuni panti.

Pendekatan komunikasi menunjukkan bahwa interaksi dilakukan secara terbuka dan personal, di mana pihak panti tidak hanya menginformasikan program, tetapi juga aktif mendengar aspirasi dan keluhan lansia melalui forum pertemuan rutin. Hal ini bertujuan menciptakan relasi yang lebih manusiawi, sehingga lansia merasa dihargai sebagai individu, bukan semata-mata sebagai objek penerima layanan. Sementara itu, pelaksana tugas menyoroti pentingnya komunikasi dalam bentuk administratif dan koordinatif, terutama dalam penyebaran informasi program serta menjaga kelancaran pelaksanaan kebijakan melalui koordinasi lintas instansi. Bentuk komunikasi ini memastikan agar semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang selaras dan dapat bekerja secara kompak.

Dalam praktik sehari-hari, pelaksana harian mengedepankan komunikasi informal yang bersifat spontan namun penuh kepedulian. Interaksi ini menjadi sarana efektif untuk menangkap kebutuhan atau permasalahan lansia secara cepat,

sehingga respons dapat segera diberikan. Ketiga bentuk komunikasi personal, administratif, dan informal saling melengkapi dan membentuk sistem komunikasi yang utuh dan adaptif.

Kesepakatan para informan juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kualitas komunikasi. Tanpa adanya komunikasi yang jelas dan empati, risiko kesalahpahaman akan meningkat dan bisa menghambat efektivitas program. Bagi lansia sendiri, komunikasi yang hangat dan terbuka menjadi penopang utama terciptanya rasa aman, nyaman, dan dihargai. Selain itu, panti juga menyediakan ruang bagi lansia untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, termasuk permintaan pribadi yang biasanya segera direspons oleh petugas. Hal ini mencerminkan adanya pola komunikasi yang responsif dan berorientasi pada penghormatan martabat lansia.

Secara keseluruhan, komunikasi di UPTD Tresna Werdha Nirwana Puri tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis dalam pelaksanaan program, tetapi juga menjadi pondasi utama dalam menciptakan pelayanan perlindungan sosial yang efektif, partisipatif, dan bermartabat. Komunikasi yang dibangun dengan prinsip keterbukaan, empati, dan kesetaraan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan lansia secara menyeluruh—baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

4.8.3 Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan sosial bagi lansia di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat berbagai

keterbatasan.

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), panti memiliki total 62 personel, terdiri dari 24 ASN dan 38 non-ASN, yang tersebar dalam berbagai unit kerja seperti tata usaha, seksi pelayanan dan penyantunan, serta tenaga fungsional (perawat dan pengasuh). Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas SDM cukup tersedia. Para pengasuh dan tenaga fungsional umumnya telah memiliki pelatihan atau pengalaman kerja dengan lansia, bahkan sebagian telah mengabdikan lebih dari 10 tahun. Ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya bertumpu pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas dan kompetensi petugas yang mampu memahami kebutuhan lansia secara holistik.

Namun demikian, implementasi kebijakan perlindungan sosial tidak lepas dari kendala anggaran. Dana yang tersedia dari pemerintah dinilai belum mampu mencakup seluruh kebutuhan lansia, terutama dalam aspek layanan kesehatan, bimbingan mental, dan kegiatan sosial. Meskipun kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian dapat terpenuhi, banyak kegiatan penunjang lainnya yang belum berjalan optimal. Ini menjadi tantangan serius, mengingat perlindungan sosial bagi lansia tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga aspek psikologis dan sosial yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Kondisi sarana dan prasarana juga menjadi bagian penting dalam pembahasan ini. Berdasarkan hasil wawancara, sejumlah fasilitas seperti kamar tidur, ruang pelayanan, serta alat bantu lansia masih dalam proses perbaikan atau bahkan belum tersedia secara memadai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun

secara administratif dan operasional panti berjalan, aspek kenyamanan dan kelayakan hidup lansia belum sepenuhnya terpenuhi sesuai standar pelayanan sosial.

Menariknya, dari sisi persepsi penerima manfaat (lansia), pelayanan yang diberikan tetap dianggap memuaskan. Hal ini terutama karena kehadiran petugas yang sabar, perhatian, dan selalu mendampingi aktivitas harian lansia. Lansia merasa diperhatikan secara personal, meskipun mereka juga menyadari adanya keterbatasan fasilitas atau keterlambatan dalam penyediaan obat-obatan. Ini menunjukkan bahwa dalam implementasi perlindungan sosial, faktor pendekatan emosional dan komunikasi interpersonal antara pengasuh dan lansia menjadi kekuatan tersendiri.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan perlindungan sosial di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda telah menunjukkan upaya maksimal dari berbagai pihak, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Namun, untuk mencapai pelaksanaan kebijakan yang lebih ideal, diperlukan dukungan tambahan, khususnya dalam hal anggaran dan peningkatan fasilitas. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat atau organisasi sosial juga dapat menjadi strategi alternatif untuk menutupi kekurangan yang ada.

4.8.4 Diposisi/Sikap

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda disikapi secara positif dan strategis oleh pihak pengelola. Meskipun efisiensi membawa

dampak nyata terhadap dinamika pengelolaan dan pelaksanaan layanan, sikap adaptif dan tanggung jawab institusional menjadi fondasi utama dalam menjaga kesinambungan pelayanan sosial bagi lansia. Pihak panti tidak melihat efisiensi semata sebagai upaya pemangkasan anggaran, melainkan sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan ketelitian dalam penggunaan sumber daya, dan memastikan bahwa setiap kebijakan tetap berorientasi pada kepentingan penerima manfaat.

Penyesuaian dilakukan terutama dalam aspek pengelolaan keuangan, melalui penguatan perencanaan, pengawasan anggaran, serta kehati-hatian dalam pengadaan dan pencatatan belanja. Langkah ini memperlihatkan adanya kesadaran kolektif terhadap pentingnya akuntabilitas dalam menghadapi keterbatasan. Meskipun terjadi pengurangan dalam program tambahan, seperti pengembangan diri bagi lansia, namun pelayanan utama seperti konsumsi, kebersihan, dan kesehatan tetap dijalankan secara konsisten. Ini menjadi indikator bahwa pengelola menetapkan skala prioritas yang jelas demi melindungi hak dasar lansia atas pelayanan yang layak.

Strategi efisiensi diarahkan dengan cermat agar tidak mengganggu interaksi langsung antara petugas dan lansia. Koordinasi internal diperkuat, dan kerja sama antar personil ditingkatkan, sehingga kekurangan dalam sektor pendukung dapat diatasi melalui kolaborasi dan fleksibilitas kerja. Komitmen pengelola untuk tetap menjaga mutu pelayanan tercermin dari pelaksanaan evaluasi berkala dan fokus terhadap aspek esensial dalam perlindungan sosial. Sikap ini memperlihatkan kemampuan institusi untuk bertahan dan berinovasi

meskipun dalam tekanan fiskal.

Dari sisi penerima manfaat, lansia tetap merasakan kepuasan terhadap layanan yang diberikan. Mereka menyatakan menerima perhatian yang cukup, makanan yang bergizi, dan akses terhadap layanan kesehatan secara rutin. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi yang dilakukan secara hati-hati dan terukur tidak mengurangi kualitas hidup mereka secara langsung. Sebaliknya, pendekatan pengelolaan yang responsif dan manusiawi justru memperkuat kepercayaan lansia terhadap institusi yang menaungi mereka.

Secara keseluruhan, sikap yang ditunjukkan oleh pihak pengelola UPTD Tresna Werdha Nirwana Puri dalam menghadapi kebijakan efisiensi mencerminkan keteguhan untuk tetap menjaga martabat pelayanan sosial. Kebijakan efisiensi direspon bukan dengan pemotongan membabi buta, melainkan dengan pendekatan strategis dan selektif yang tetap menempatkan kesejahteraan lansia sebagai prioritas utama.

4.8.5 Birokrasi

Prosedur birokrasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial, khususnya di lembaga pelayanan publik seperti panti sosial. Berdasarkan hasil penelitian, UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda menjalankan prosedur yang terstruktur dan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mendukung program perlindungan sosial bagi lansia. Pelaksanaan kebijakan diawali dengan penyusunan rencana operasional yang mengacu pada pedoman dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, disertai dengan koordinasi lintas bidang mulai dari pengelolaan anggaran hingga

pelaporan, sesuai dengan peraturan nasional seperti Undang-Undang Pekerja Sosial dan Permensos tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini menunjukkan bahwa prosedur birokrasi yang diterapkan bukan sekadar administratif, melainkan juga memastikan keterpaduan dan akuntabilitas kebijakan di tingkat daerah.

Dalam pelaksanaannya, dokumen pendukung menjadi syarat penting yang harus melalui proses verifikasi berlapis mulai dari unit kerja, kepala UPTD, hingga Dinas Sosial. Proses ini dirancang untuk mengurangi kesalahan administrasi dan memastikan kegiatan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, layanan bagi lansia mengikuti 12 komponen SPM yang mencakup berbagai kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, pakaian, hingga layanan psikososial dan administrasi kependudukan.

Selain prosedur formal yang ketat, panti sosial juga menyediakan mekanisme yang memungkinkan lansia menyampaikan kebutuhan pribadi mereka. Permintaan diajukan lewat petugas atau pengasuh, diverifikasi, dan dibahas dalam forum internal sebelum diputuskan. Di tingkat pelaksana, permintaan ini dicatat dan diproses berdasarkan urgensi serta ketersediaan anggaran, dengan tindak lanjut yang cepat jika disetujui. Dari sudut pandang lansia, prosedur ini terasa tidak rumit karena mereka dapat langsung menyampaikan kebutuhan kepada petugas yang umumnya cepat merespons.

Dengan demikian, prosedur birokrasi yang diterapkan di UPTD Tresna Werdha Nirwana Puri tidak hanya berfungsi sebagai tata kelola administratif, tetapi juga menjadi dasar dalam menjaga kelancaran dan kualitas layanan sosial

yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan lansia. Pendekatan ini membantu panti sosial menjalankan kebijakan perlindungan sosial dengan tetap mengedepankan pelayanan yang manusiawi dan bermartabat.

4.9 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

4.9.1 Faktor pendukung

Berdasarkan data hasil penelitian di lapangan menurut pendapat key informan dan informan bahwa faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Kepada Lansia Di UPTD Panti Sosial Tresna Nirwana Puri Samarinda :

1. Penyediaan layanan yang memadai, Pelaksanaan layanan mengikuti 12 komponen Standar Pelayanan Minim yang mencakup penyediaan makanan, sandang, layanan kesehatan, bimbingan fisik dan sosial, Dengan memenuhi komponen-komponen tersebut, kebijakan perlindungan sosial bagi lansia dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat langsung kepada para lansia.
2. Komitmen Manajemen Panti Sosial, Kepemimpinan dan manajemen panti sosial yang memiliki visi dan komitmen kuat terhadap kesejahteraan lansia menjadi salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan, Meskipun sering kali menghadapi berbagai keterbatasan, seperti kekurangan dana atau fasilitas, pihak pengelola panti tetap berusaha menjalankan program-program secara optimal. Komitmen ini ditunjukkan melalui perencanaan kegiatan, pengelolaan sumber daya, serta inovasi dalam memberikan pelayanan.

4.9.2 Faktor Penghambat

Berdasarkan data hasil penelitian di lapangan menurut pendapat *key informan* dan *informan* bahwa faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Kepada Lansia Di UPTD Panti Sosial Tresna Nirwana Puri Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Anggaran, Dalam beberapa kasus, keterbatasan anggaran dapat menjadi penghambat dalam penumbuhan kebutuhan khusus lansia. Meskipun prosedur pengajuan ada, pemenuhan kebutuhan sangat tergantung pada anggaran yang tersedia. Hal ini bisa membatasi kemampuan panti untuk memenuhi semua kebutuhan lansia secara menyeluruh.
2. Keterbatasan Dokumen Pribadi, Banyak lansia yang datang ke panti dalam kondisi terlantar, tanpa pedamping, keluarga dan tidak diketahui latar belakangnya atau asal-usulnya secara jelas. Akibatnya, mereka sering kali tidak membawa dokumen identitas sama sekali, seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Pendukung, Kartu Keluarga. Tanpa ketiga dokumen tersebut, proses pengurusan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi sangat sulit dilakukan. Hal ini karena data dasar yang dibutuhkan untuk verifikasi dan pendaftaran di sistem administrasi kependudukan tidak tersedia. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pihak panti dalam memenuhi kewajiban pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan secara umum bahwa: Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Kepada Lansia Di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda untuk mendukung kesimpulan maka peneliti sajikan pada masing-masing fokus penelitian sebagai berikut:

1. Komunikasi sudah cukup baik, dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial untuk lansia. Komunikasi yang dilakukan bersifat dua arah, terbuka, dan sesuai tugas petugas, tidak hanya menyampaikan informasi tapi juga membangun hubungan penuh perhatian dengan lansia. Bentuk komunikasi personal, administratif, dan informal saling melengkapi sehingga membantu kebijakan berjalan lancar dan lansia merasa dihargai. Panti juga menyediakan ruang bagi lansia menyampaikan kebutuhan langsung dengan respons cepat. Dengan demikian, komunikasi menjadi dasar utama dalam memberikan layanan yang efektif, partisipatif, dan bermartabat bagi lansia.
2. Sumber daya sudah cukup baik dari segi jumlah SDM dan memiliki kualifikasi yang relevan untuk mendukung pelayanan lansia. Namun, masih terdapat kekurangan dari segi dukungan anggaran dan fasilitas penunjang.
3. Kebijakan efisiensi disikapi dengan sikap positif dan strategi yang tepat

oleh pengelola panti. Meskipun efisiensi memengaruhi pengelolaan dan pelaksanaan layanan, pengelola tetap menjaga kualitas pelayanan dasar bagi lansia melalui perencanaan yang baik, pengawasan ketat, dan penggunaan sumber daya yang hati-hati. Pengurangan program tambahan dilakukan, namun pelayanan utama seperti makanan, kebersihan, dan kesehatan tetap diprioritaskan. Koordinasi dan kerja sama antar petugas diperkuat agar kekurangan bisa diatasi tanpa mengganggu interaksi langsung dengan lansia. Para lansia juga merasa puas dengan layanan yang diterima, menunjukkan bahwa efisiensi tidak menurunkan kualitas hidup mereka. Secara keseluruhan, pengelola panti mampu menghadapi kebijakan efisiensi dengan cara yang selektif dan bertanggung jawab, sehingga kesejahteraan lansia tetap menjadi fokus utama.

4. Birokrasi sudah berjalan dengan baik dan terstruktur. Proses dimulai dari perencanaan yang mengacu pada regulasi dan dilanjutkan dengan koordinasi lintas bidang serta verifikasi berjenjang. Layanan yang diberikan 12 komponen Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan ada prosedur yang jelas dalam pemenuhan kebutuhan khusus lansia.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka beberapa saran yang perlu disampaikan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Kepada Lansia di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda, sebagai berikut:

1. Perlu adanya fleksibilitas dalam kebijakan efisiensi agar kegiatan tambahan yang mendukung kesejahteraan lansia tetap dapat terlaksana, serta perlunya monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap pengelolaan anggaran.
2. Perlu ada penambahan dukungan anggaran dari pemerintah maupun kerja sama dengan pihak eksternal agar fasilitas penunjang dan program pelayanan dapat lebih optimal dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- AGUSTIONO, 2019, *Dasar – dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta. Bandung
- ANDI PRASTOWO, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Persepektif Rancangan*, ArRuzz Media, Yogyakarta.
- ARIKONTO, 2014, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Penerbit: PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2019, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Penerbit: PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- EKA AFRIANA DJMHARI, 2020, *Kondisi Kesejahteraan Lansia dan Perlindungan Sosial Lansia Di Indonesia*, Penerbit: Perkumpulan Prakarsa, Jakarta Selatan.
- EKO SUGIARTO, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*, Penerbit: Suaka Media, Jakarta.
- ERWAN AGUS, 2015, *Implementasi Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta.
- HADARI NAWAWI, 2017, *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori Dan Praktek*, PMN, Surabaya.
- HARDANI, DKK, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Dan R&D*, Penerbit: Alfabeta, Bandung.
- HASAN, 2020, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- JOKO PROMONO, 2020, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Unisri Press, Surakarta.
- KAELEN, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*, Penerbit: Paradigma, Yogyakarta.
- LEO AGUSTINO , 2019, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Jakarta.
- MUKTAS MAS“UD, BAHTIA, ABD. RAHMAN, 2022, *Implementasi Kebijakan Publik*, Penerbit: Citra Multi Persada, Makassar.
- NAWAWI, 2017, *Publike Policy Analisis, Strategis Advokasi Teori Dan Praktek*, PMN, Surabaya.

- NOVITA TRESIANA, 2019, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- NUGROHO, W, 2014, *Keperawatan Gerontik & Geriatrik Edisi 3*, EGC, Jakarta.
- NURDIN USMAN, 2017, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- RACHMAN TRIJONO, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Papyrus Sinar Sintaji, Jakarta.
- RIANT NUGROHO, 2023, *Kebijakan Publik*, Penerbit: PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- SUGIYONO, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi R&D*, Alfabeta, Bandung.
- _____, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- _____, 2019, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung.
- _____, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Penerbit: Alfabeta, Bandung.
- SUKARDI, 2018, *Penelitian Kualitatif – Naturalistik Dalam Pendidikan*, Penerbit: Usaha Keluarga, Jakarta.
- SOLICHIN ABDUL WAHAB, 2017, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- TACHJAN, 2016, *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI.
- TRIJONO RACHMAD, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner, Paradigma*, Yogyakarta.
- HUSAINI USMAN DAN PURNOMO SETIADY AKBAR, 2017, *Metode Penelitian Sosial*, Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta.
- V. WIRANTA SUJARWENI, 2019, *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi, Dan Hasil Penelitian*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- WAHAB, 2017, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang.
- WINARNO, 2017, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Dan Teknik*, Tarsita, Bandung.

ZUCHRI ABDUSSAMAD, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit: CV Syakir Media Press, Makassar.

DOKUMEN

Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 17 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan

Tata Kerja UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Kota Samarinda Yang memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kepada Para Lanjut Usia

JURNAL

EDI SUHARTO, 2015, *Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan, Sosiohumaniora* Vol 17 No. 1

ENCE SURAHMAN, 2020, *Kajian Teori Dalam Penelitian*, 20(3), 49-58. diakses dari : <https://www.researchgate.net> (Januari 2020)

NURUL MAWADDAH, 2020, *Peningkatan Kemampuan Adaptasi Lansia dengan Terapi Kelompok*. Jurnal Kesehatan Dr. Soebandi, 8(1), 49-55

OKTORA, S. P. D., & Purnawan, 1(2018), *Pengaruh Terapi Murottal Al Qur'an Terhadap Kualitas Tidur Lansia Di Unit Rehabilitas Sosial Dewanata Cilacap*. Jurnal Keperawatan Soedirman, 11(3), 168-173

RATNAWATI, OKTAVIANA, 2022 „*Peran Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar Di Kota Malang Melalui Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (Aslut)*“, *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 6.1 1-10

SARI, A, 2021, *Dukungan Sosial Dan Kesehatan Mental Lansia : Tinjauan Pustaka*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 15(2), 123-130

Yani, A., Eryani, T. W. R., Salmon, G. A., & Wendy, M. (2024). Study of the Implementation of Samarinda Mayor Regulation Number 4 of 2023 in the Kelurahan Tenun Area of Samarinda City. *Golden Ratio of Data in Summary*, 4(2), 312-321.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS SOSIAL
UPTD. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
Jalan Mayjen Soetoyo Ex. Remaja Telp. (0541) 733732 @mail: uptdpstwnp.spt.dinsos.kaltim@gmail.com
S A M A R I N D A 75117

Samarinda, 17 April 2025

Nomor : 500.10.3.1 / 97 / UPTD 1 / 2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Universitas
Widya Gama Mahakam Samarinda

di_

Samarinda

Menindak lanjuti surat nomor 116 / UWGM-FISIP / AK / III / 2025 tanggal 26 Maret 2025, perihal permohonan izin Penelitian di UPTD PSTW Nirwana Puri Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya UPTD PSTW Nirwana Puri Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tidak keberatan dengan kegiatan yang dimaksud sejauh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga kami;
2. Mahasiswa pelaksana kegiatan penelitian sebagai berikut :

Nama : Nur Alvina Zahroh
NPM : 2163201008
Fakultas/Prodi : Administrasi Publik
3. Judul penelitian :
" Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Kepada Lansia di UPTD PSTW Nirwana Puri Samarinda "
4. Saat melaksanakan kegiatan pengambilan data/penelitian di lingkungan UPTD PSTW Nirwana Puri Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur agar memperhatikan aturan-aturan yang berlaku;
5. Mengkoordinasikan segala bentuk kegiatan ke UPTD PSTW Nirwana Puri Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur melalui Seksi Pembinaan dan Terminasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Kepala UPTD,



Sri Wahyuni, S.E.
NIP. 197012261998032006
Pembina

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial di dalam Panti ini
- B. Apakah Kebijakan yang digunakan terutama Kebijakan dari Pemerintah Provinsi

Komunikasi

- A. Apa bentuk komunikasi yang diterapkan dalam pelaksana kebijakan perlindungan sosial bagi lansia di panti ini ?
- B. Mengapa komunikasi yang baik penting dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial bagi lansia ?

Sumber Daya

- A. Beberapa komposisi SDM di Panti Sosial ini (jumlah, jenis profesi, kualifikasi)?
- B. Apakah dana yang tersedia mencukup untuk memenuhi kebutuhan lansia (makanan, kesehatan, kegiatan sosial, dll)
- C. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana panti sosial ini ? (bangunan, kamar, fasilitas, kesehatan, dll).

Disposisi/Sikap

- A. Apakah saat ini ada imbas dari Kebijakan Efisiensi dari Panti ini? jika ada bagaimana cara Bapak/Ibu apakah Kebijakan efisiensi ini berdampak pada kualitas perlindungan sosial bagi lansia ?
- B. Menurut Bapak/Ibu apakah kebijakan efisiensi ini berdampak pada kualitas Perlindungan Sosial bagi lansia ?

Birokrasi

- A. Apa saja prosedur birokrasi yang harus dilalui dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial bagi lansia ?
- C. Apakah ada prosedur dari panti jika ada lansia yang ingin mengajukan sesuatu seperti kebutuhan mereka ?

Lansia

1. Apakah di sini ada fasilitas untuk menerima keluhan/masukan untuk lansia?
2. Apakah Bapak/Ibu tau berapa orang pengasuh lansia dalam Panti ini ?
3. Bagaimana makanan yang diberikan di Panti sini apakah selalu ada perubahan dan apakah menunya sangat cukup dan bergizi untuk Bapak/Ibu ?
4. Apakah ada prosedur dari Panti jika Bapak/Ibu ingin meminta sesuatu yang Bapak/Ibu butuhkan di Panti ini ?



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 8 ayat (1) (6) Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS SOSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Anak Terlantar adalah anak karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.
7. Perkembangan Sosial Anak adalah bagaimana anak usia dini berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa dan masyarakat luas agar dapat menyesuaikan diri dengan baik sesuai apa yang diharapkan oleh bangsa dan negara.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Pelayanan Sosial adalah proses pelayanan yang di tujukan kepada klien/penerima manfaat agar mampu mengembangkan relasi sosial yang positif dan menjalankan peranan sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.
10. Anak Remaja adalah seseorang yang tumbuh menjadi dewasa mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik. Dimana remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar dan sedang mengalami proses perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Menurut World Health Organization (WHO), remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut Peraturan Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah.
11. Remaja Terlantar adalah seorang anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani dan sosial.
12. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

13. Tuna Sosial yang selanjutnya disingkat dengan TS adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial, atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas warga binaan pemasyarakatan, dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome.
14. Korban Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat dengan KPO adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
15. Korban Tindak Kekerasan yang selanjutnya disingkat KTK adalah seseorang, kelompok, maupun masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan bentuk lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
16. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
17. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan sosialnya
18. Pengasuhan adalah kemampuan suatu keluarga atau rumah tangga dan komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan serta bagi anggota keluarga lainnya.
19. Advokasi sosial merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak perubahan, dengan cara memberikan dukungan dan pembelaan terhadap kaum lemah atau terhadap mereka yang menjadi korban dari sebuah kebijakan dan ketidakadilan.
20. Terminasi adalah proses pengakhiran pelayanan sosial kepada penghuni panti/klien/penerima manfaat.
21. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas yang meliputi atas:

- a. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri, Kelas A;
- b. UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma, Kelas A;
- c. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan, Kelas A;

- d. UPTD Panti Sosial Bina Anak Remaja Terampil, Kelas A;
- e. UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Harapan Mulia, Kelas A; dan
- f. UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama, Kelas B.

BAB III
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

Kepala UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
 - d. Seksi Pembinaan dan Terminasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 5

Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pelayanan, penyantunan, pembinaan kesejahteraan sosial Lanjut Usia Terlantar serta melaksanakan urusan ketatausahaan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan, penyantunan dan pembinaan kesejahteraan sosial Lanjut Usia Terlantar;

- b. pelaksanaan operasional pelayanan, penyantunan dan pembinaan kesejahteraan sosial Lanjut Usia Terlantar dalam panti;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan, penyantunan dan pembinaan kesejahteraan sosial Lanjut Usia Terlantar dalam panti; dan
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan dalam panti pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 Kepala UPTD mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana operasional UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. memonitor pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program koordinasi dan konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah;
- f. memonitor pelaksanaan program pembinaan panti asuhan/panti jompo;
- g. memonitor pelaksanaan tugas-tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi lainnya;
- h. memonitor pelaksanaan tugas jabatan pelaksana dan tugas Jabatan Fungsional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan instansi ke Dinas dan instansi terkait;
- j. mengarahkan penyusunan laporan tahunan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri dengan cara membandingkan rencana yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporankegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan akuntabilitas kinerja Dinas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, kehumasan, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan kehumasan;
- e. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- f. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana operasional/program kerja sub bagian tata usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran;
- f. melaksanakan program koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah;
- g. melaksanakan program pembinaan panti asuhan/panti jompo;
- h. melaksanakan tugas sub bagian tata usaha ke Kepala UPTD dan Seksi lainnya;
- i. melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha ke staf pelaksana umum dan keuangan;

- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Sosial; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3

Seksi Penyantunan dan Pelayanan

Pasal 11

- (1) Seksi Penyantunan dan Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Seksi Penyantunan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan penyantunan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada Lanjut Usia Terlantar.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Penyantunan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan penyantunan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada Lanjut Usia Terlantar;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penyantunan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada Lanjut Usia Terlantar;
- c. pelaksanaan penyantunan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada Lanjut Usia Terlantar;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyantunan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada Lanjut Usia Terlantar di dalam panti;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyantunan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlantar di dalam panti; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 12, Seksi Penyantunan dan Pelayanan mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Penyantunan dan Pelayanan berdasarkan rencana operasional/program kerja Seksi Penyantunan dan Pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penyantunan dan Pelayanan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyantunan dan Pelayanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penyantunan dan Pelayanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan program kegiatan Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
- f. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyantunan dan pelayanan;
- g. melaksanakan pelaksanaan program penyantunan dan pelayanan Lanjut Usia Terlantar dalam panti;
- h. melaksanakan pelaksanaan tugas-tugas Seksi Penyantunan dan Pelayanan ke Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Pembinaan dan Terminasi;
- i. melaksanakan program instansi terkait;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyantunan dan Pelayanan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Penyantunan dan Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Sosial; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 4
Seksi Pembinaan dan Terminasi

Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan dan Terminasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Seksi Pembinaan dan Terminasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pembinaan dan terminasi Lanjut Usia Terlantar.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Pembinaan dan Terminasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan dan Terminasi;

- b. penyiapan bahan pembinaan dan peningkatan pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar;
- c. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar;
- e. pelaksanaan terminasi terhadap klien panti Lanjut Usia Terlantar;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan pemberdayaan lanjut; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 15, Seksi Pembinaan dan Terminasi mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan dan Terminasi berdasarkan rencana operasional/program kerja Seksi Pembinaan dan Terminasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Terminasi agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Terminasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Terminasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan pembinaan dan Terminasi;
- f. melaksanakan program kegiatan, pembinaan dan Terminasi klien serta mengevaluasi;
- g. melaksanakan program pembinaan Lanjut Usia Terlantar dalam panti;
- h. melaksanakan tugas kepada Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Penyantunan dan Pelayanan;
- i. melaksanakan program kegiatan ke instansi terkait;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan dan Terminasi dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pembinaan dan Terminasi sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Sosial;

Gambar 1. Dokumentasi wawancara dengan *Key Informan*



Sumber Peneliti 22 April 2025

Gambar 2. Dokumentasi Wawancara dengan Informan



Sumber Peneliti 22 April 2025

Gambar 3. Dokumentasi Wawancara dengan Informan Bapak Erik Kharuddin



Sumber Peneiti 22 April 2025

Gambar 4. Dokumentasi Wawancara dengan Informan Bapak Hidayat



Sumber Peneliti 22 April 2025

Gambar 5. Asrama Lansia



Sumber Peneliti 22 April 2025